

**Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap
Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Mochamad Ali Imron
Nomor Mahasiswa : 15313168
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2019**

**Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap
Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Oleh :

Nama : Mochamad Ali Imron
Nomor Mahasiswa : 15313168
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/ sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Yogyakarta, 01 April 2019

Penulis,



Mochamad Ali Imron

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Nama : Mochamad Ali imron
Nomor Mahasiswa : 15313168
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 01 April 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Faaza Fakhrunnas, S.E., M.Sc

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH RISIKO INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA**


Disusun Oleh : **MOCHAMAD ALI IMRON**

Nomor Mahasiswa : **15313168**

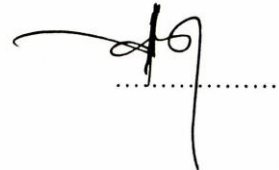
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 8 Mei 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Faaza Fakrunnas, SE., M.Sc.



Penguji : Heri Sudarsono, SE.,MEc



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

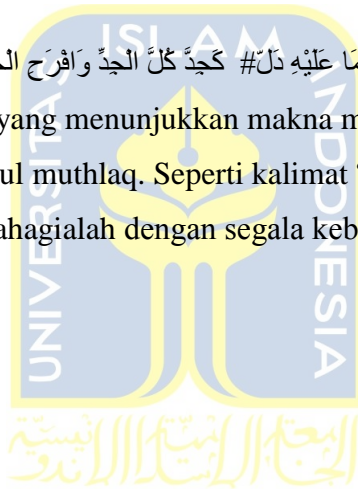
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah (2) 32)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ لِمَا نَوَى

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan (HR. Bukhori dan Muslim)

وَقَدْ يَنْوِبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلٌّ # كَجِدِّ كُلِّ الْجِدِّ وَأَفْرَحَ الْجَدَلِ

Terkadang, ungkapan yang menunjukkan makna mashdar juga bisa menggantikan mashdar sebagai maf'ul muthlaq. Seperti kalimat “Bersungguhlah dengan segala kesungguhan dan berbahagialah dengan segala kebahagiaan” (Alfiyah Ibnu Malik)



PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Moch. Ichwan dan Ibu Siti Maisaroh serta kakak saya Miftachurrohmah sebagai motivator terbesar dalam hidup saya yang tidak pernah lengah untuk selalu mendoakan dan memberi cinta dan kasih sayang kepada saya. Terimakasih untuk semua ridho dan doa yang selalu mengiringi langkahku.
2. Masyayikh saya, terkhusus kepada Murobbi ruhi KH Ridwan As-Syaibani, KH Rosim Al-Fatih, KH Wahyuddin, KH Jamaluddin, dan para masyayikh Nahdlatul 'Ulama.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama berproses di UII. Khususnya Bapak Akhsyim Afandi, Bapak Faaza Fakhrunnas, terimakasih telah membersamai saya selama menempuh program sarjana ini.
4. Bapak Rektor UII dan seluruh jajarannya, khususnya DPK UII, Bapak Beni Suranto dan Ibu Hazhira Qudsyi yang telah membina saya dengan program-program pembinaan yang luar biasa, sehingga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal kedepan dan bermanfaat bagi orang lain.
5. Seluruh partner belajar saya, khususnya Bapak Md Akhir Bin Mohd Sharif dari Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia yang berkenan berbagi inspirasi dan selalu memberikan motivasinya.
6. Founder HAI Institute Lithuania, Ruta dan Rasa yang telah berbagi pengalaman dan mengajarkan kepada saya disiplin kerja berstandar eropa.
7. Seluruh pihak yang sudah mendukung studi saya, memotivasi dan menginspirasi saya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Moch. Ichwan dan Ibu Siti Maisaroh yang takhenti-hentinya memanjatkan doa, memberikan nasehat, dukungan, dan kasih sayang yang begitu besar, hanya bisa mendoakan jazakumallah ahsanal jaza’.
2. Bapak Faaza Fakhrunnas, S.E., M.Sc sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini atas arahan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sahabudin Sidiq, Dr., S.E., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

6. Seluruh bapak dan ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu dan pengetahuan akan menjadi bekal yang berharga bagi penulis untuk menghadapi dunia pendidikan selanjutnya ataupun dunia kerja.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik selama penulis menempuh studi.
8. Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2019

Penulis,

Mochamad Ali Imron

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi.....	x
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	12
2.1.1 Dasar dan Pengertian BPRS.....	13
2.1.2 Perkembangan BPRS di Indonesia	15
2.1.3 Bentuk Organisasi BPRS	17
2.1.4 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	22
2.2 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	24

2.2.1	Return on Asset (ROA)	24
2.3	Risiko Internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	25
2.3.1	<i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	26
2.3.2	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	28
2.4	Risiko Eksternal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	31
2.4.1	Inflasi	31
2.4.2	Pertumbuhan Ekonomi	34
2.5	Variabel Pengukur Risiko Kinerja BPRS	36
2.5.1	Total Aset (<i>Size</i>)	36
2.5.2	Kepemilikan	36
2.6	Kerangka Pemikiran	38
2.7	Hipotesis Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN		40
3.1	Jenis dan Cara Pengumpulan Data	40
3.2	Definisi Operasional Variabel	41
3.3	Metode Analisis Data	43
3.3.1	Estimasi Model	43
3.3.2	Pemilihan Model	44
3.3.3	Uji Chow	44
3.3.4	Hausman Test	44
3.3.5	Uji Evaluasi Hasil	45
3.2.1.1	Uji F	45
3.2.1.2	Uji t	46
3.2.2	Uji Asumsi Klasik	47
3.2.2.1	Uji Normalitas	47
3.2.2.2	Multikolinieritas	48
3.2.2.3	Heteroskedastisitas	49

3.4.3.4 Autokorelasi	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Uji Deskriptif	51
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.1 Uji Normalitas.....	52
4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	52
4.2.3 Uji Autokorelasi.....	53
4.3 Uji Data Panel	54
4.3.1 Analisis Data	54
4.4 Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Rekomendasi.....	67
Daftar Pustaka	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018	1
Tabel 1.1 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank.....	20
Tabel 1.2 Peringkat komposit tingkat kesehatan bank.....	21
Tabel 1.3 Daftar BPRS.....	38
Tabel 1.4 Definisi Variabel.....	40
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas.....	51
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.4 Hasil estimasi <i>Common Effect Model</i> (CEM)	52
Tabel 4.5 Hasil estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	53
Tabel 4.7 Hasil estimasi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	54
Tabel 4.9 Tabel Hasil Estimasi Kinerja BPRS.....	55
Table 4.1.0 Hasil Estimasi Kepemilikan (<i>Dummy Variable</i>).....	60

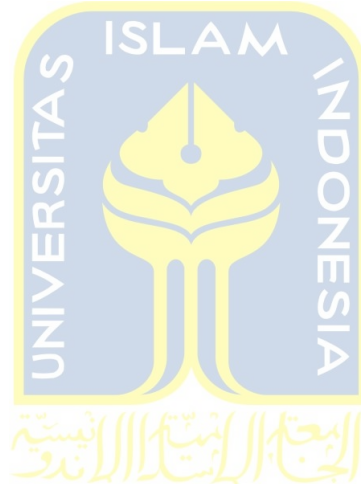
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018	2
Gambar 1.2 Perkembangan Laba Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018....	3
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Data Penelitian.....	70
Lampiran II.	Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)	82
Lampiran III.	Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)	83
Lampiran IV.	Hasil Uji Chow	84
Lampiran V.	Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)	85
Lampiran VI.	Hasil Uji Hausman.....	86
Lampiran VII.	Hasil Uji Normalitas dan Uji Multikolinieritas	87
Lampiran VIII.	Hasil Estimasi Variabel Kepemilikan Pemerintah	91
Lampiran IX.	Hasil Estimasi Variabel Kepemilikan Swasta	90
Lampiran X.	Jumlah BPRS Berdasarkan Provinsi di Indonesia	93



ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam peningkatan kerjanya juga menghadapi risiko-risiko perbankan, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko-risiko tersebut memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kerjanya. Risiko internal BPRS dicerminkan oleh variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Sedangkan risiko eksternalnya dicerminkan oleh Inflasi (Inf) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Untuk melihat pengaruh tersebut, variabel Total Aset (*Size*) dan Kepemilikan (*Own*) antara Pemerintah dan Swasta juga digunakan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja BPRS. Kedua, variabel KPMM berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap kinerja BPRS. Ketiga, variabel Inflasi (Inf) berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap kinerja BPRS. Keempat, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS. Kelima, variabel Total Aset (*Size*) berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja BPRS. Keenam, BPRS milik pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS. Sedangkan, BPRS milik swasta berhubungan negatif dan signifikan terhadap kinerja BPRS.

Kata Kunci : BPRS, Kinerja, Risiko Internal, Risiko Eksternal

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998, dunia terguncang oleh krisis keuangan Asia. Krisis tersebut berawal dengan menyerang Thailand pada 1997, sebelum menyebar dan menyerang negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling menderita akibat krisis tersebut dengan penurunan rupiah paling parah dan jangka waktu pemulihan paling lama. Industri Perbankan di Indonesia juga luluh lantah karena tingkat rasio *Non-Performing Loan* (NPL) juga naik tajam. Pada akhir tahun 1998, NPL industri perbankan di Indonesia mencapai 48,6%, yang artinya hampir setengah dari kredit yang disalurkan perbankan pada saat itu bermasalah (Kasmir, 2014).

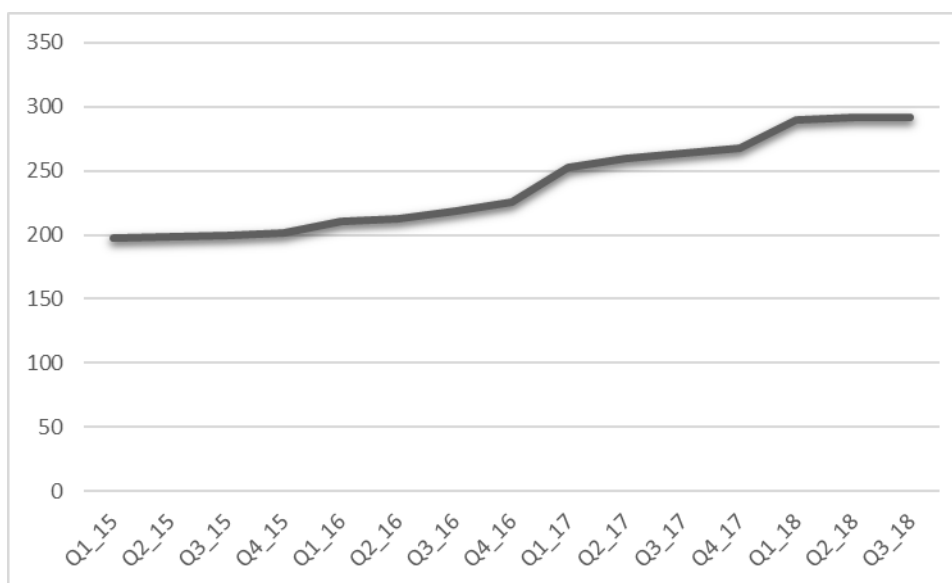
Kredit bermasalah yang sangat tinggi tersebut menyebabkan terjadinya *hyperinflation* dan masyarakat cenderung memiliki sentimen negatif atas kondisi demikian karena bank-bank tempat mereka menyimpan dananya mengalami kesulitan likuiditas. Masyarakat lantas berbondong-bondong menarik dana di bank atau yang dikenal dengan istilah *bank rush*. Ketika *bank rush* terjadi, perekonomian akan mati. Karena perekonomian Indonesia sangat tergantung pada sektor perbankan untuk membiayai aktivitas ekonomi. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 tercatat berkontraksi sebesar -13,1%, yang merupakan sejarah kelam perbankan di Indonesia yang sangat rentan terhadap krisis (Kasmir, 2014).

Tabel 1.1 Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
BUS	13	1.827	294,30	189,68	241,07
UUS	21	349	138,88	105,34	100,14
BPRS	168	459	11,24	8,52	7,17
Total	202	2.635	444,43	303,54	348,38

Sumber: OJK (2018) dalam triliun rupiah

Dapat dilihat dari kondisi anatomi perbankan di Indonesia, perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank adalah lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21/2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan dengan jenisnya bank syariah terdiri dari atas: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2016).



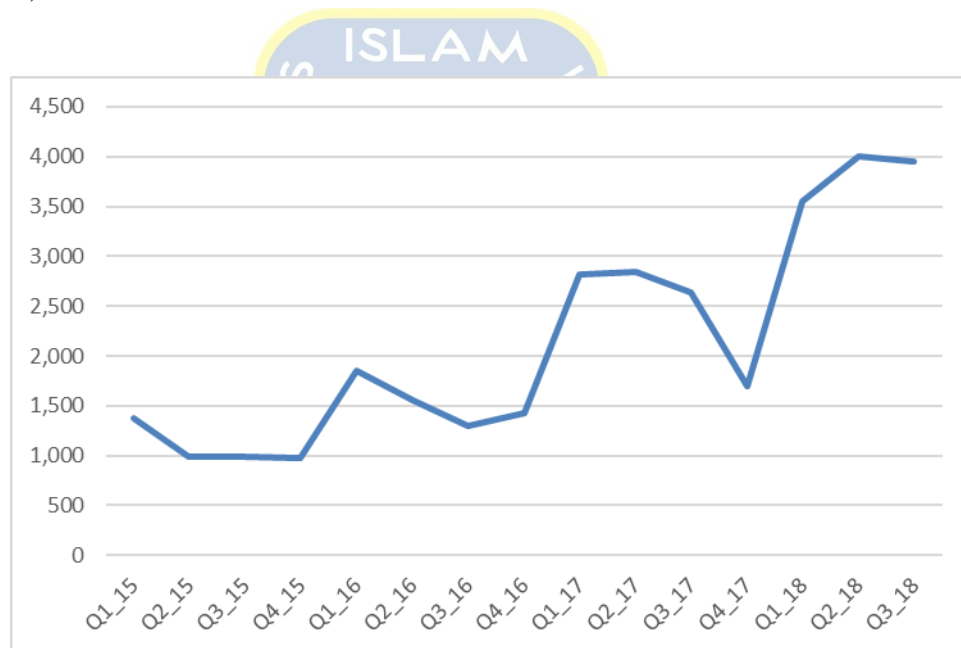
Sumber : OJK (2018) dalam miliar rupiah

Gambar 2.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa BPRS mengalami pengembangan pesat. Pengembangan tersebut juga ditunjukkan oleh Tabel 1.1 bahwa Perbankan syariah pada tahun 2018 menunjukkan kondisi perbankan syariah yang ditinjau dari jumlah institusi perbankan syariah, jumlah kantor, aset perbankan, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga dapat ditinjau dengan melihat perkembangan kinerja dari waktu ke waktu.

Dalam industri perbankan syariah, pertumbuhan tingkat asset perbankan dan tingkat profitabilitas bank syariah dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar prospek industri perbankan syariah ke depan.

Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat jelas pada Gambar 1.1, bahwa Bank Syariah meunjukkan prospek yang positif, pada triwulan 1 di tahun 2015, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 197.931 triliun. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016, rata-rata total aset bank syariah meningkat diangka Rp 211.173 triliun. Dan peningkatan tersebut terus terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 252.594 miliar triliun dan ditahun ini pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan rata-rata total aset diangka Rp 289.717 triliun (OJK, 2017).



Sumber : OJK (2018) dalam miliar rupiah

Gambar 1.2 Perkembangan Laba Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai perkembangan laba perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa laba perbankan syariah di Indonesia mengalami tren yang positif. Pada triwulan 1 ditahun 2015, Bank Syariah memiliki laba sebesar Rp 1.371 miliar. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016 meningkat diangka Rp 1.853 miliar. Dan peningkatan tersebut terus

terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki laba sebesar Rp 2.823 miliar dan ditahun 2018 pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan laba diangka Rp 3.557 miliar.

Dalam melayani industri sektor mikro, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berkomitmen untuk menjadi bank syariah yang memberikan pendanaan di sektor mikro. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, BPRS memiliki fungsi yang sama dengan Bank Umum lainnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang mempunyai dana berlebih. Namun yang menjadi perbedaannya terdapat pada kegiatan lalu lintas pembayaran. Jika merujuk pada Tabel 1.1, sampai saat ini BPRS memiliki jumlah institusi sebanyak 168 unit yang 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan Bank Umum Syariah yang hanya berjumlah 13 unit. Jumlah kantor BPRS juga tergolong banyak diangka 459 unit kantor karena tergolong berusia muda. Total aset yang dimiliki BPRS tergolong besar diangka 11.24 triliun rupiah dengan penyaluran pembiayaan sebesar 8.52 triliun dan dana pihak ketiga sebesar 7.17 triliun. Dalam usia yang sangat muda, BPRS sudah menunjukkan prospek yang menjanjikan dan diyakini akan menggerakkan sektor UMKM dari segi pembiayaan (Hindarto, 2011)

Kehadiran BPRS memiliki tujuan khusus untuk menyediakan produk dan layanan perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di kota maupun di kawasan pedesaan dengan prinsip syariah. Secara umum, BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif mirip dengan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya. Lembaga keuangan mikro memiliki dua tujuan utama yang harus dicapai pada saat yang bersamaan, pengembangan komersial dan masyarakat. Ini berarti lembaga keuangan mikro komersial dalam bisnis harus menghasilkan laba sehingga kegiatan dapat dipertahankan (berkelanjutan) dan kemampuan untuk melayani nasabah meningkat (penjangkauan). Hal ini terkait erat dengan tujuan kedua yaitu pengembangan masyarakat (Hosen, 2013). Dalam penyaluran dana, BPRS menawarkan produk pembiayaan-pembiayaan, dengan menggunakan beberapa akad seperti: akad bagi hasil atau *profit-loss sharing (equity-based financing)*

yaitu mudarabah dan musyarakah, akad jual beli yang berupa piutang (*debt-based financing*) yakni murabahah, istishna, salam dan qardh (pinjam-meminjam). Juga akad sewa menyewa (ijarah). Skema akad yang diterapkan oleh BPRS tersebut menunjukkan bahwa skema transaksi keuangan tergolong islami dan halal (OJK, 2016).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam usaha mencapai tujuannya, selain berorientasi pada pelayanan sosial, juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai keuntungan tersebut pasti terdapat risiko-risiko perbankan, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko-risiko tersebut memiliki dampak langsung pada kinerja perbankan (Almazari, 2014). Salah satu risiko internal yang sering dihadapi oleh BPRS adalah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) dan risiko kebangkrutan. Jika NPF semakin tinggi, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan BPRS, karena BPRS harus memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jika kondisi ini terus meningkat, maka modal BPRS akan terserap untuk membayar PPAP yang terbentuk. Karena itulah BPRS mengharapkan nilai NPF selalu rendah, untuk meningkatkan nilai profitabilitas BPRS tersebut (Said, 2015).

Nilai NPF dapat diukur dengan mengukur rasio pembiayaan gagal dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan (NPF rasio). Kategori NPF rasio didasarkan pada besaran kredit dengan membandingkan total jumlah kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menentukan persentase besaran NPF, untuk BPRS maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7%, sedangkan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional adalah sebesar 5%. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS akan meningkat pula. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), dengan didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi, hal ini didukung oleh penelitian Said (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Hosen (2013) juga menjelaskan bahwa NPF mencerminkan tingkat pengembalian bermasalah pembiayaan yang disediakan oleh nasabah ke bank. Risiko kerugian akibat pembayaran kembali pembiayaan bank tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan dan laba diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dilengkapi dengan perjanjian jual beli atau prinsip dan keuntungan berbagi. Pembiayaan dengan kontrak untuk bagi hasil adalah mudarabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan pembiayaan dengan pembelian adalah murabahah, salam dan istishna pembiayaan. Pembiayaan, yang telah disalurkan oleh perbankan syariah melalui prinsip jual beli dan pembagian keuntungan dengan nasabah, berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Masalah pembiayaan di BPRS telah dikaitkan dengan ketentuan bisnis yang dibiayai oleh bank berbasis syariah. Apakah nasabah (mudharib) telah sepenuhnya menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak yang disepakati, ataukah nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja, hal tersebut menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah yang akan ditunjukkan oleh tingkat NPF (Said, 2015). Fakhrunnas dan Mifrahi (2018) mengungkapkan bahwa risiko kebangkrutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja BPRS. Risiko tersebut akan melihat bagaimana kapabilitas BPRS dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki serta mengukur sejauh mana keberlangsungan BPRS dalam mendapatkan profit secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat risiko kebangkrutan maka akan dapat menjadi indikasi bahwa BPRS sangat rentan terhadap perubahan kinerja keuangan yang dimiliki. Tingginya tingkat kerentanan tersebut juga menjadi tanda bagi BPRS untuk dapat menjalankan aktivitas bisnis yang dimiliki dengan baik.

Sementara itu risiko eksternal BPRS dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ditinjau dari sudut pandang Indonesia, efek makroekonomi dapat menyebabkan reaksi yang lebih rumit berkenaan dengan sistem perbankan yang saat ini sedang diterapkan. Untuk menangkap perilaku pengambilan risiko perbankan secara komprehensif dan mendapatkan perspektif baru tentang hubungan antara

pengambilan perilaku risiko dan faktor makroekonomi (Fakhrunnas ddk., 2018). Pertumbuhan ekonomi daerah akan mencerminkan risiko dalam pengembalian pembiayaan disuatu daerah, yang berdampak pada *outstanding* pembiayaan dalam kategori non lancar (Trujillo-Ponce, 2013). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka NPF akan menurun, karena kemampuan nasabah untuk memenuhi *capability to pay back* meningkat.

Selanjutnya, efek inflasi tergantung pada stabilitas ekonomi makro, dimana inflasi ini berpengaruh buruk terhadap perekonomian dan berakibat negatif terhadap kinerja perbankan syariah, dikarenakan jika terjadi inflasi yang parah maka, keadaan perekonomian menjadi tidak stabil. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi dan berproduksi menjadi berkurang sehingga, dapat menurunkan keuntungan perbankan (Trujillo-Ponce, 2013). Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian ini perlu diadakan lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Risiko Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS?
2. Bagaimanakah pengaruh variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap kinerja BPRS?
3. Bagaimanakah pengaruh variabel Inflasi (Inf) terhadap kinerja BPRS?
4. Bagaimanakah pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap kinerja BPRS?
5. Bagaimanakah pengaruh variabel Total Aset (Size) terhadap kinerja BPRS?

6. Bagaimanakah pengaruh variabel Kepemilikan (Ownership) terhadap kinerja BPRS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap kinerja BPRS.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Inflasi (Inf) terhadap kinerja BPRS.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap kinerja BPRS.
5. Untuk menganalisis pengaruh variabel Total Aset (Size) terhadap kinerja BPRS
6. Untuk menganalisis pengaruh variabel Kepemilikan (Ownership) terhadap kinerja BPRS

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk mengasah nalar berfikir, mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan menerapkan teori yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah, dengan menganalisa laporan keuangan kinerja BPRS dengan berbagai variabel risiko dari internal maupun eksternal BPRS. Adapun manfaat bagi lembaga keuangan adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam tindakan mengambil keputusan dan menjadikan acuan dalam manajemen risiko yang tepat, baik dalam menganalisa risiko internal maupun eksternal BPRS.

Manfaat bagi lembaga pendidikan adalah untuk menambah literatur ilmiah untuk pengembangan ilmu dan kajian ilmiah kedepan serta, menambah informasi untuk meningkatkan kualitas analisis kedepan. Adapun untuk Peneliti selanjutnya, bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk

mengembangkan penelitian risiko BPRS, seiring pergantian tren ekonomi global yang semakin cepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka Dan Landasan Teori

Dalam bab ini membahas dan berisi tentang hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada topik yang sama sehingga dapat dijelaskan perbedaan sekaligus menghindari duplikasi dan berisi teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka. Teori-teori ini akan digunakan sebagai landasan bagi penulis untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis-jenis data yang digunakan dan bagaimana cara pengumpulan data dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini memaparkan data penelitian dan menyajikan hasil analisis yang diperoleh serta pembahasannya.

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dalam penelitian ini dan implikasi yang muncul dari simpulan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam memecahkan masalah penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang BPRS oleh Muhamad Nadrattuzaman Hosen (2013) dalam *International Journal of Academic Research in Economics and Management*, karyanya yang berjudul “*Sciences Efficiency of the Sharia Rural Bank in Indonesia Lead to Modified Camel*” menyebutkan bahwa selama periode penelitiannya, rata-rata tingkat efisiensi BPRS di Indonesia adalah 81.41% yang merupakan tingkat efisiensi biaya tertinggi di BPRS Bakhti Sumekar yang merupakan BPRS untuk menilai efisiensi biaya tertinggi dengan efisiensi 97.77% dan skor efisiensi terendah di BPRS Masyarakat Ummat Indonesia dengan skor efisiensi biaya 60.07%. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara input komponen harga tenaga kerja dan harga dana, output komponen total pendanaan, penempatan pada bank lain dan faktor lingkungan ekuitas terhadap total aset dan pembiayaan bermasalah pada efisiensi biaya BPRS secara bersamaan dapat diterima. Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa BPRS di Indonesia, variabel input komponen yaitu harga tenaga kerja dan harga dana dan output komponen yaitu total dana, penempatan dengan bank lain berpengaruh pada tingkat biaya BPRS efisiensi, sedangkan faktor lingkungan ekuitas atas total aktiva dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya BPRS. Ketika dibandingkan dengan bank syariah, rata-rata skor BPRS efisiensi jauh lebih rendah sekitar 80.44%, sedangkan untuk bank syariah mencapai 93.96%.

Trinugroho (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa BPRS di Indonesia bahkan memiliki margin lebih tinggi daripada bank umum karena risiko khas dari mereka melalui kegiatan peminjaman. Selain itu, Indonesia memiliki *market size* yang sangat potensial dengan populasi umat muslim sekitar 200 juta, yang dinobatkan sebagai negara umat muslim terbesar didunia. Dengan menggunakan sampel 151 BPRS di Indonesia yang menunjukkan bahwa margin mereka dipengaruhi oleh dua variabel tingkat bank dan tingkat regional. Persaingan dan pendapatan diversifikasi adalah dua variabel tingkat

bank utama yang secara signifikan mempengaruhi margin bank. BPRS meningkatkan margin bank dalam lingkungan yang kurang kompetitif dan ketika mereka memiliki lebih sedikit diversifikasi dalam pendapatan mereka. Semua variabel tingkat regional secara signifikan mempengaruhi margin bank, menyiratkan bahwa perbedaan regional memainkan peran penting dalam penentuan margin. Penelitian lain oleh Ken B. Cyree (2012) dalam *Journal of Banking and Finance* yang berjudul “*The effects of big-bank presence on the profit efficiency of small bank in rural market*” menyakikan bahwa ketika bersaing dengan bank besar, BPR beroperasi pada tingkat efisiensi yang lebih rendah, tetapi dengan ROA yang lebih tinggi dan peningkatan tingkat bunga dan pendapatan fee dari pinjaman. Efisiensi laba yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih tinggi di *rural market*. Oleh karena itu, BPR tidak boleh takut pada pesaingnya yang terkategori bank besar.

Penelitian Simone Varotto (2018) dalam *Journal of International Money and Finance* yang berjudul “*Systemic risk and bank size*” menjelaskan bahwa indikator risiko sistemik terutama didorong oleh ukuran perusahaan (asset bank) yang menyiratkan jargon “*too big to fail*” sehingga bank-bank besar lebih bagus dalam mengantisipasi risiko dan mengendalikan risiko sehingga jauh dari kebangkrutan. Bank-bank dengan ukuran yang besar akan melakukan pengecekan sistemik terhadap risiko sehingga mereka bias menghadapinya dengan sangat baik. William (2018) menyatakan bahwa harga saham bank yang turun secara signifikan setelah kenaikan tingkat atau kemiringan kurva hasil yang tidak terduga, akan melakukan reaksi lebih besar untuk bank yang sangat bergantung pada simpanan inti tetapi berkurang untuk bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo yang besar, konsisten dengan peran bank dalam transformasi jatuh tempo. Perubahan suku bunga yang diinduksi oleh kebijakan tampaknya memengaruhi laba akuntansi terutama melalui margin bunga bersih dan perubahan dalam komposisi neraca bank.

Shawgat S. Kutubi (2018) tentang hubungan antara kinerja bank dan pengambilan risiko dengan kesibukan direksi dalam kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian ini menemukan hubungan terbalik antara kesibukan direksi dan kinerja

bank dan hubungan antara kesibukan direksi dan pengambilan risiko bank. Kesibukan direksi di dalam berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank dan pengambilan risiko sedangkan kesibukan direksi independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan pengambilan risiko.

Nabilah Rozzani (2017) dalam *Research in International Business and Finance* yang berjudul “*Risk management process: Profiling of islamic microfinance providers*” membandingkan dan membedakan risiko yang dihadapi oleh dua jenis penyedia keuangan mikro syariah di Malaysia, yaitu organisasi non-pemerintah dan lembaga keuangan komersial. Menggunakan metode studi kasus komparatif, sesi wawancara dilakukan pada staf dari dua penyedia keuangan mikro Islam. Sehubungan dengan pencairan dan sistem pembayaran mereka, ditemukan bahwa baik Lembaga A maupun Lembaga B sama-sama terpapar pada risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko kredit. Thomas B. (2013) juga menjelaskan tentang penyebaran global keuangan Islam telah mengubah sistem keuangan di banyak negara muslim, tetapi analis hanya tahu sedikit tentang faktor-faktor yang membentuk permintaan individu akan keuangan Islam. Penelitian ini membahas asal-usul sosio-ekonomi permintaan konsumen untuk produk keuangan Islam, menggunakan data survei asli dari Indonesia, di mana pasar keuangan Islam yang berkembang hidup berdampingan dengan sistem keuangan konvensional yang besar. Modernisasi dan globalisasi memainkan peran penting dalam membentuk penggunaan individual produk-produk keuangan Islam. Mungkin mengejutkan, tidak ada bukti bahwa kesalehan Islam memiliki efek sistematis pada pilihan konsumen terhadap produk keuangan Islam versus konvensional.

Federico Beltrame (2018) tentang analisis bagaimana kualitas aset bank berinteraksi dalam hubungan antara leverage dan risiko sistematis. Penelitian ini menguraikan tiga penyesuaian leverage untuk mensterilkan efek provisi dan menggabungkan efek kredit macet dan eksposur risiko kredit total. Dalam hal ini ditemukan bahwa relevansi efek gabungan dari leverage dan kualitas aset sebagai komponen risiko sistematis. Pembiayaan macet (*non performing financing*) ditemukan sebagai salah satu variabel risiko pasar yang signifikan. Dengan

menunjukkan bahwa leverage sederhana dianggap kurang mampu untuk memverifikasi risiko keuangan bank. Sehingga diperlukan model leverage yang lebih baik dalam memverifikasi keuangan dalam suatu perbankan.

2.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.2.1 Dasar dan Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan dengan tujuan untuk melayani usaha mikro dan kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/17/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah (Hendro SP, 2014). Selain itu BPRS juga diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 2016, OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 03 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dari segi penamaan sudah terlihat berbeda, dilihat dari sisi penggunaan istilah Pembiayaan dengan Perkreditan.

BPRS menggunakan istilah pembiayaan dikarenakan kata perkreditan sering digunakan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Sedangkan untuk bank yang menggunakan sistem syariah, mereka tidak menggunakan istilah perkreditan akan tetapi, menggunakan istilah pembiayaan. Kegiatan usaha yang dijalankan BPRS mencakup pendanaan (tabungan dan deposito) serta pembiayaan (peminjaman) yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dari segi jenis kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah, mudharabah, atau akad lain seperti mudharabah untuk produk deposito berjangka yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua jenis penghimpunan dana ini dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik berdasarkan akad jual beli, sewa menyewa, prinsip bagi hasil, prinsip tabaru' (qordh) dan pengambilalihan hutang (hiwalah).
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah seperti layanan *Automated Teller Machine* (ATM), kas keliling dan lain sebagainya setelah mendapat persetujuan dan izin dari OJK.

BPRS berbeda dengan Bank Umum Syariah, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPRS (OJK, 2016), sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin BI.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- f. Mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional
- g. Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI atau sekarang OJK.

Berdasarkan POJK No. 03 tahun 2016, badan hukum usaha BPRS wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pendirian BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh Pertama warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia. kedua pemerintah daerah. Ketiga kerjasama kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua (OJK, 2016).

Dilihat dari segi syarat minimum permodalan yang disetor untuk pendirian BPRS, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok berdasarkan zona pendirian BPRS yang sesuai dengan syarat permodalannya. Modal yang disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:

- a. Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 1.
- b. Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 2.
- c. Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 3.
- d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), untuk BPRS yang didirikan di zona 4.

Terlihat jelas dari paparan tersebut bahwasannya jika BPRS memiliki dana modal yang minim, maka akan masuk pada kategori zona empat dengan syarat modal minimum tiga milyar lima ratus juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak modal yang dimiliki untuk pendirian BPRS, maka semakin naik pula zona pendirian yang sesuai modal tersebut.

2.2.2 Perkembangan BPRS di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, yang merupakan hasil dari usaha tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV. Kemudian terbitlah UU No.7 tahun 1992 mengenai Perbankan, yang memperkuat landasan hukum berdirinya bank syariah di Indonesia. Menurut Suryani (2011) dengan diamandemennya UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 telah membuat perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Menurut UU tersebut Perbankan diperbolehkan untuk menerapkan *dual banking system* yang memberikan izin perbankan konvensional untuk membuka bank syariah baru maupun mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Oleh sebab itu, bank syariah juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menawarkan jasa perbankan berprinsip syariah.

Adanya kebijakan baru untuk mendirikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2005-2015), pertumbuhan unit Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilihat dari sisi kelembagaannya tercatat bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS dan 19 UUS, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 11 buah BUS dan 23 buah UUS (Hamat, 2013). Namun, sampai dengan Agustus 2015, jumlah BUS sudah mencapai 12 unit, sedangkan jumlah UUS mencapai 22 unit dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 163 unit (Hanania, 2015).

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia cukup menggemberikan. Pada triwulan ketiga tahun 2018, BPRS di Indonesia berjumlah 168 BPRS dari sebelumnya berjumlah 165 BPRS pada triwulan ketiga tahun 2016. Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah BPRS terbanyak. Selain itu, industri BPRS mampu menyerap 4.495 tenaga kerja langsung dengan 459 kantor (OJK, 2018). Meskipun demikian, perlambatan ekonomi ditahun 2017 membuat pertumbuhan industri perbankan syariah khususnya BPRS menurun. Namun, potensi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia diprediksi masih memiliki potensi besar untuk tumbuh. Apabila dibandingkan tingkat *market share* bank syariah dengan bank konvensional yang masih bergerak lambat antara 4% sampai 5%. Dilihat dari enam tahun sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada 2011 sekitar 35% hingga 45%. Proyeksi tersebut berdasarkan kondisi perbankan syariah di Indonesia yang terus membaik dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 yang mencapai 6% hingga 6,5% dengan laju inflasi yang terkendali pada level kurang dari 5% (Siregar, 2010).

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2017 juga berdampak pada tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang meningkat di kisaran 10.5% bahkan pada maret 2018 sampai 11.60%. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya masih berada di kisaran 8.63% (OJK, 2018). Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan prospek yang positif. Pada triwulan 1 ditahun 2015,

Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 197.931 triliun. Sedangkan pada triwulan 1 pada tahun 2016, rata-rata total aset bank syariah meningkat diangka Rp 211.173 triliun. Dan peningkatan tersebut terus terjadi sampai triwulan 1 pada tahun 2017, Bank Syariah memiliki rata-rata total aset sebesar Rp 252.594 triliun dan ditahun 2018 pada triwulan 1 juga terjadi peningkatan dengan rata-rata total aset diangka Rp 289.717 triliun. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di BPRS. BPRS juga tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang sekaligus akan meningkatkan pasar industri keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2018).

2.2.3 Bentuk Organisasi BPRS

Bentuk BPRS berdasarkan POJK No. 03 tahun 2016 adalah mencakup Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berlaku efektif setelah mendapatkan izin dari OJK.

2.2.3.1 Direksi

Tugas dan fungsi direksi antara lain adalah menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPRS. Posisi direksi sebagai pelaksana manajemen berdasarkan kebijakan umum dari dewan komisaris. Direksi bertanggungjawab terhadap operasional BPRS agar lembaga tetap sehat dan tumbuh secara brekelanjutan. Seorang pimpinan direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota komisaris atau pejabat eksekutif di lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Anggota direksi berhenti apabila masa jabatan sudah berakhir atau meninggal dunia. Direksi juga bisa diberhentikan berdasarkan RUPS ketika ditemukan terdapat tindakan direksi yang dapat merugikan BPRS, dengan alasan tertentu atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya (Prasetyoningrum, 2010).

2.1.3.2 Dewan Komisaris

Tugas utama dewan komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPRS. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, mengawasi kepengurusan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS serta membina dan mengembangkan BPRS. Dewan komisaris dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dewan komisaris lain, atau dengan anggota direksi untuk menjaga integritas dewan komisaris. Mekanisme pemberhentian dewan komisaris kurang lebih sama dengan mekanisme pemberhentian direksi yaitu habis masa periode atau meninggal dunia. Pemberhentian ini berdasarkan hasil keputusan RUPS (Prasetyoningrum, 2010).

2.2.3.2 Dewan Pengawas Syariah

BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkerja di kantor pusat minimal satu orang dan maksimal tiga orang. Tugas dan fungsi utama dari DPS adalah memastikan dan mengawasi operasional kegiatan usaha dari BPRS berdasarkan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Pemberhentian anggota DPS juga berdasarkan hasil RUPS (Prasetyoningrum, 2010).

2.2.3.3 Good Corporate Governance BPRS

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia PBI No. 04 tahun 2006 dan diperbaharui dengan PBI No.14 tahun 2006 yang mengatur prinsip Transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan berkeadilan (Hendro SP, 2014)

2.2.3.4 Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini merupakan kegiatan mengungkapkan laporan BPRS secara transparan dan akuntabel terkait kinerja perusahaan baik kinerja keuangan maupun tata kelola manajemen perusahaan. Proses pencatatan BPRS harus sesuai standar dan aturan yang berlaku, memiliki SDM yang kompeten dibidangnya agar tingkat akuntabilitas perusahaan baik dan menghasilkan tenaga ahli

keuangan syariah yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu unsur untuk mendapatkan kepercayaan publik. Adapun aturan dalam Islam yang mengharuskan melakukan pencatatan keuangan yang baik, didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًاۙ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِیْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاَمْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهٰدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰی ۗ وَلَا يَأْبَ الشَّهٰدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسٰمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اٰجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسَّهٰدَةِ ۗ وَاذْنٰی اٰلَا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حٰضِرَةً تُدَيِّرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۙ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰۤاَيْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِیْدٌ ۗ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَنْفَوُا اللّٰهُ وَاَعْلَمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkan nya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, aka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Dalam kitab Tafsir Sirojul Munir, diterangkan bahwa ayat di atas, pada dasarnya diturunkan untuk menanggapi perihal masalah larangan riba. ketika riba dilarang, maka Allah mengizinkan atau memperbolehkan transaksi salam dan hutang (Asyarbini, 2015). Kemudian kandungan ayat 282 menjelaskan perihal aturan mengenai permasalahan hutang atau tanggungan satu pihak dengan pihak yang lain. Sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Mawardi, menerangkan bahwa dalam ayat tersebut dengan jelas terlihat perintah pencatatan mengenai tanggungan satu pihak dengan pihak lain dilihat dari redaksi yang menggunakan bentuk fi'il amar atau kata perintah.

Terdapat dua pendapat mengenai perintah pencatatan transaksi atau ikatan tanggungan antara pihak satu dengan pihak lain. Pertama, mewajibkan pencatatan transaksi utang-piutang, salam atau transaksi yang mengandung unsur tanggungan pihak satu dengan pihak lain. Ulama yang mewajibkan pencatatan yaitu Imam Rabi` dan Imam Ka`ab. Kedua, terdapat juga ulama yang mensunnahkan pencatatan ini yaitu Imam Said Al Khudri, Imam Hasan dan Imam As Syu`bi. (Bashri, 2015). Berdasarkan keterangan tersebut, ayat ini relevan sebagai dasar ajaran mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah termasuk BPRS, sebab bank merupakan lembaga intermediasi dimana posisi bank punya kewajiban terhadap nasabah pembiayaannya. Di sisi lain, pihak nasabah pembiayaan memiliki kewajiban terhadap bank untuk memenuhi perjanjian dan konsekuensi dari akad yang telah disepakati.

2.2.3.5 Tanggungjawab

Prinsip tanggungjawab ditekankan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPRS seperti karyawan, nasabah dan lain sebagainya. BPRS diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi para *stakeholders*. Prinsip ini mendorong bahkan mewajibkan setiap transaksi yang dijalankan oleh BPRS harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Sehingga kedua belah pihak (bank dan nasabah) tidak ada yang dirugikan. Prinsip tanggungjawab sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam amanah bermuamalat pada prinsipnya adalah menyempurnakan dan memenuhi akad bermuamalat (transaksi) dan tidak bertentangan dengan (ketentuan) akad (Bashri, 2015).

2.2.3.6 Profesionalisme

Profesionalisme dan pelayanan yang bagus merupakan salah satu faktor kunci kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BPRS. Diberikannya amanah kepada ahlinya atau orang yang mampu mengelola dana, dapat membantu tercapainya tujuan dan target bersama. Sebaliknya pemberian amanah kepada orang yang bukan ahlinya dapat memberikan efek terhambatnya target yang diinginkan. Tenaga dan sikap profesional menjadi faktor penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan (Prasetyoningrum, 2010)

2.2.3.7 Berkeadilan

Prinsip keadilan menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam. Sehingga BPRS diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Secara prinsip, nilai keadilan dapat tergambar dalam akad atau produk BPRS yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip keadilan menjadi suatu yang sangat penting dalam Islam, hal ini tertera dalam surat Al Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

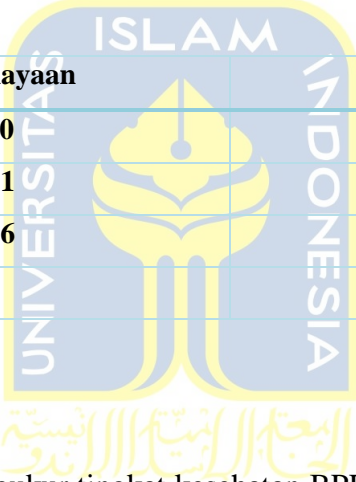
2.2.4 Review Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas dan pembina lembaga keuangan bank telah menetapkan ukuran dalam penilaian kesehatan Bank. Hasil sebuah penelitian yang dipublikasikan tahun 2004 dalam situs buletin milik BI, penilaian tingkat kesehatan bank yang juga berlaku untuk BPRS dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan dua aspek, yaitu CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, & Liquidity*) dan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) (Kasmir, 2014). Pada Mei 2004 terdapat tambahan unsur metode penilaian CAMEL berupa aspek sensitivitas terhadap pelepasan pembiayaan yang berpengaruh terhadap strategi memperoleh laba. Unsur-unsur dalam metode CAMEL masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda tergantung tingkat risikonya. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) memiliki pengaruh paling besar karena penanaman dana utama BPRS pada aktiva

produktif khususnya pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat, maka akan langsung mempengaruhi rentabilitas bank dan selanjutnya akan mengikis modal.

Bank memiliki Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang didasarkan pada POJK tahun 2016 pasal 02, yang berbunyi bahwa BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Kemudian diberikan nilai dan diakumulasikan secara keseluruhan. Hasil penilaian ditetapkan kedalam empat golongan predikat kesehatan bank yang di presentasikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank



Nilai Pembiayaan	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - <81	Cukup Sehat
51 - <66	Kurang Sehat
0 - 51	Tidak Sehat

Sumber: Kasmir (2014)

Khusus untuk mengukur tingkat kesehatan BPRS, BI pada 4 Desember 2007 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/17/PBI/2007 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penilaian khusus BPRS hanya mencakup aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas keuangan yang dilakukan secara kuantitatif dan faktor manajemen secara kualitatif. Adapun hasil penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan dalam bentuk peringkat komposit sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

No.	Peringkat	Keterangan
1	Komposit 1	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik

		sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
2	Komposit 2	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
3	Komposit 3	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.
4	Komposit 4	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
5	Komposit 5	Bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Sumber: Kasmir (2014)

Semakin bagus kinerja keuangan BPRS, maka semakin bagus pula BPRS tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kinerja keuangan BPRS yang kurang baik, maka BPRS tersebut dianggap tidak sehat. Ketidaksehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut tidak terlepas dari risiko internal dan eksternal BPRS yang dihadapi.

2.3 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.3.1 *Return on Asset (ROA)*

ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. ROA dapat membantu BPRS untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh (Dumawi, 2012). Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Laba juga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh BPRS. Alasan pemenuhan laba BPRS tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya (Kasmir, 2014).

Semakin tinggi rasio ROA BPRS ini menunjukkan semakin baiknya produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini akan menambah

daya tarik investor. Ketika BPRS semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden yang semakin besar, maka juga akan berdampak pada harga saham dari BPRS yang akan semakin meningkat sehingga ROA juga akan meningkat. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila lebih dari 2% (Houston, 2010). *Return On Asset* (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah Rumus *Return On Asset* (ROA) :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) sangatlah penting bagi bank, karena aset merupakan faktor utama dalam keberlangsungan BPRS yang dalam pengelolaannya selalu mengandung risiko.

2.4 Risiko Internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Risiko internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dicerminkan oleh NPF rasio untuk melihat kualitas pembiayaan. Kategori NPF rasio didasarkan pada besaran pembiayaan dengan membandingkan total jumlah pembiayaan yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004/12/4/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank Indonesia telah menentukan presentase besaran NPF, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7%, sedangkan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional adalah sebesar 5%. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS juga akan meningkat. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), yang keuntungan BPRS didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi, hal ini didukung oleh penelitian Said (2015).

Peneliti lain oleh Hosen (2013) juga menjelaskan bahwa Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat pengembalian bermasalah pembiayaan

yang disediakan oleh nasabah ke bank. Risiko kerugian akibat pembayaran kembali pembiayaan bank tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan dan laba diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dilengkapi dengan perjanjian jual beli atau prinsip dan keuntungan berbagi. Pembiayaan dengan kontrak untuk bagi hasil adalah mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan pembiayaan dengan pembelian adalah murabahah, salam dan istishna pembiayaan (Hosen, 2013).

Pembiayaan, yang telah disalurkan oleh bank-bank Islam melalui prinsip jual-beli dan pembagian keuntungan dengan nasabah, berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah. Masalah pembiayaan di Bank-bank Islam telah dikaitkan dengan bagaimana bisnis dibiayai oleh Islam bank telah dikelola, apakah nasabah (mudharib) telah sepenuhnya menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak yang disepakati, ataukah nasabah lalai atau melakukan kesalahan yang disengaja, hal tersebut menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah yang akan ditunjukkan oleh tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) (Said, 2015).

2.4.1 *Non-Performing Financing* (NPF)

NPF (*Non-Performing Financing*) atau rasio pembiayaan bermasalah, digunakan untuk mengukur tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan oleh bank. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004/12/4/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPF diatas 5 persen maka bank tersebut tidak sehat. Sehingga, semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar (Wibowo, 2013). Dalam indikatornya, NPF rasio bisa mempresentasikan kualitas pembiayaan.

Kategori bank itu sehat atau tidak, dicerminkan oleh NPF rasio yang didasarkan pada besaran pembiayaan dengan membandingkan total jumlah pembiayaan yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menentukan presentase besaran NPF, untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun BPR konvensional ditentukan batas NPF sebesar 7 persen. Apabila BPRS melebihi batas NPF yang telah ditentukan Bank

Indonesia, maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Dan ketika risiko pembiayaan meningkat, maka margin BPRS akan meningkat pula. Karena sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, melainkan dengan sistem pembagian untung rugi (*loss-profit sharing*), yang keuntungan BPRS didasarkan pada akad dan pembagian untung rugi (Said, 2015).

2.4.1.1 Non Performing Financing (NPF) Gross

NPF Gross adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, Macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Rumus NPF Gross adalah sebagai berikut:

$$NPF\ Gross = \frac{Pembiayaan\ kurang\ lancar,\ diragukan,\ macet}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

2.4.1.2 Non Performing Financing (NPF) Net

NPF Net adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 (Kurang lancar, diragukan, dan macet) dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektibilitas 3 sampai 5. Secara singkat Rumus NPF Net adalah sebagai berikut:

$$Rumus\ NPF\ Net = \frac{Pembiayaan\ Macet}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Dengan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang dicerminkan oleh NPF, dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas pembiayaan yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian pembiayaan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan terhadap pembiayaan yang telah diberikan tersebut dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas pembiayaan BPRS akan tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila pemberian pembiayaan tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas pembiayaan BPRS akan dengan mudah menjadi buruk (Kasmir, 2014). Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dapat ditempuh Bank dengan cara menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Contohnya dalam prosedur pemberian pembiayaan, BPRS harus memperhatikan seluruh tahapan prosedur yang berlaku. Jikalau prosedur yang

sudah ada tidak dijalankan dengan benar, maka kemungkinan suatu pembiayaan akan menjadi bermasalah (Kasmir, 2014).

Pembiayaan merupakan aset berisiko yang dimiliki oleh BPRS, oleh karena itu BPRS harus menjaga dan mengamankannya sehingga kemungkinan menderita kerugian dapat dihindari. Pengawasan harus dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Pengawasan pembiayaan dapat dilakukan terhadap internal BPRS, khususnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dan administrasi pembiayaan, serta terhadap debitur selaku penerima pembiayaan (Siddiqua & Haque, 2017). Dengan melakukan pengawasan terhadap internal BPRS, maka kemungkinan memburuknya kualitas pembiayaan dapat dikurangi. Pengawasan terhadap debitur secara berkesinambungan akan memudahkan BPRS dalam mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi debitur, sehingga BPRS akan segera dapat membantu mencari solusi penyelesaiannya. Hal ini sangat penting, karena permasalahan debitur dapat mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran kembali pembiayaan yang diterima, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kualitas pembiayaan menjadi buruk (Kasmir, 2014).

Administrasi pembiayaan sangat penting dalam kegiatan pembiayaan, karena dari administrasi, kita bisa melihat dan memperoleh keterangan atau berbagai informasi penting diantaranya mengenai pelaksanaan pemberian pembiayaan dan perkembangan debitur. Selain itu, dokumentasi dan administrasi pembiayaan dapat menentukan baik buruknya kualitas pembiayaan suatu Bank. Hal ini tertuang jelas dalam ketentuan, yaitu apabila dokumentasi dan arsip debitur tidak dapat memberikan informasi yang cukup, maka pembiayaannya akan sangat tidak lancar (Kasmir, 2014).

2.4.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dalam bahasa Inggris disebut CAR (*capital adequacy ratio*), faktor ini selalu dipandang sebagai masalah vital bagi lembaga keuangan. Ini didefinisikan sebagai persentase dari modal primer lembaga keuangan terhadap asetnya dan digunakan sebagai ukuran kekuatan dan stabilitas keuangannya (Asikhia, 2013). Hal tersebut juga disampaikan oleh

Romdhane (2012) yang mempelajari faktor-faktor penentu persentase modal bank di negara berkembang. Model dikembangkan untuk mengukur hubungan antara sejumlah variabel kunci bank dan rasio profitabilitasnya. Studi ini mencakup 18 bank dengan data setengah tahunan dari tahun 2002 hingga 2008. Temuan ini tampaknya setuju bahwa margin bunga dan risiko sangat mempengaruhi rasio modal. Jaminan oleh bank untuk memberikan pengembalian kepada investor dapat meningkatkan tekanan perbankan, tetapi berbeda dengan fakta bahwa investor menghargai pengembalian yang lebih tinggi, yang berpotensi menarik lebih banyak simpanan ke lembaga.

Fungsi utama dari modal bank adalah untuk menyediakan sumber daya untuk menyerap kemungkinan kerugian di masa depan atas aset (Ahmet, 2011). Dalam menentukan tingkat modal yang perlu diamankan oleh lembaga pengambil simpanan, indikator makroekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat lapangan kerja, perlu dipertimbangkan karena indikator akan secara signifikan mempengaruhi proses manajemen risiko (Harley, 2011). Hasil tersebut didukung oleh Adegbite (2010) yang menyatakan sepakat bahwa stabilitas makroekonomi bertindak sebagai faktor utama dalam kemantapan keuangan, itu adalah kunci untuk menjaga harga stabil dan memastikan defisit sektor publik marjinal dan utang luar negeri berkelanjutan. Bank-bank dengan CAR yang lebih besar akan menyerap tingkat kerugian tak terduga yang lebih tinggi sebelum menjadi bangkrut. Studi ini mempertimbangkan indikator ekonomi dan posisi keuangan masing-masing bank sebagai variabel untuk menguji dampak kecukupan modal perbandingan. Berikut adalah rumus Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

$$KPMM = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100\%$$

Asikhia (2013) menunjukkan bahwa kapitalisasi dan profitabilitas adalah indikator efisiensi manajemen risiko bank dan mengurangi kerugian yang tidak tercakup oleh pendapatan saat ini. Keuntungan atau pengembalian yang dihasilkan oleh bank menunjukkan tingkat keamanan bank. Dengan demikian, profitabilitas memainkan peran utama dalam meyakinkan deposan untuk

memasok dana dalam bentuk simpanan bank yang menguntungkan ketentuan. Hassan (2013) mengamati bahwa kinerja bank biasanya diukur dengan pengembalian atas aset (ROA) dan margin bunga bersih. ROA umumnya dipengaruhi oleh keputusan kebijakan bank dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang terkait dengan ekonomi dan peraturan pemerintah. Banyak regulator percaya ROA adalah ukuran terbaik dari profitabilitas bank. Selain itu, profitabilitas paling baik diwakili oleh ROA, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian portofolio aset.

Harley (2011) mengungkapkan bahwa dampak dari karakteristik perbankan, keuangan struktur dan ekonomi makro indikator basis modal bank di industri perbankan Nigeria selama 28 tahun. Studi ini menerapkan kerangka koreksi kesalahan dan mengungkapkan bahwa indikator ekonomi, seperti tingkat inflasi, nilai tukar riil, giro, jumlah uang beredar, ketidakstabilan politik dan pengembalian investasi adalah prediktor yang paling kuat tentang faktor penentu kecukupan modal di Nigeria. Selain itu, penelitian ini juga menentukan bahwa ada hubungan negatif antara inflasi dan basis modal bank karena inflasi mengikis modal bank di sebagian besar negara berkembang ekonomi. Abba (2013) juga meneliti hubungan antara kecukupan modal dan risiko perbankan. Tiga variabel independen digunakan - rasio aset tertimbang menurut risiko, rasio deposito dan tingkat inflasi. Dua belas bank diambil sampel dari populasi dua puluh dua bank di industri perbankan Nigeria selama lima tahun. Studi ini mengadopsi nilai pada teori risiko dan menemukan bahwa perubahan dalam rasio kecukupan modal dijelaskan oleh perubahan dalam variabel independen - ada hubungan negatif yang signifikan antara risiko dan rasio kecukupan modal bank, yang berarti bahwa ketika tingkat risiko meningkat, modal rasio kecukupan jatuh di industri perbankan Nigeria.

Menurut Adegbite (2010) ada hubungan timbal balik antara stabilitas dalam kebijakan ekonomi makro, peraturan dan pengawasan, sehingga membantu menjaga kekuatan lembaga keuangan. Samson (2012) meneliti dampak kecukupan modal dalam sub-sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi Nigeria menggunakan variabel ekonomi makro selama 30 tahun. Ini digunakan

kerangka koreksi kesalahan dan teknik co-integrasi untuk menguji hubungan antara basis modal bank dan variabel ekonomi makro. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat mengurangi kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Sehingga terdapat hubungan negatif antara inflasi dan basis modal bank karena inflasi mengikis modal bank di sebagian besar negara berkembang.

2.5 Risiko Eksternal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.5.1 Inflasi (Inf)

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara terus-menerus. Julianti (2013) menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan dari tingkatharga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Inf = inflasi

IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun dasar

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar selisih harga barang setelah adanya inflasi yang mengakibatkan harga barang menjadi lebih mahal.

2.5.1.1 Penyebab Inflasi

Menurut Mankiw N (2018) inflasi timbul karena adanya 3 faktor sebagai berikut :

a. Tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*)

Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam atau terganggunya distribusi.

b. Dorongan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian.

c. Ekspektasi inflasi (*inflation expectations*)

Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini terlihat dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (Mankiw N, 2018).

Sedangkan menurut Sukirno (2012), inflasi dibedakan menjadi 3 bentuk berdasarkan akibat terjadinya, yaitu :

a. Inflasi Akibat Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah .

c. Inflasi Diimpor

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan, contohnya kenaikan harga minyak. Dalam teori inflasi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena dapat menimbulkan kebocoran (*lack*) terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan. Wibowo (2013) menambahkan bahwa orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan yang diakibatkan dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga dapat melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat dan meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk

nonprimer dan barang-barang mewah. Disamping itu, inflasi juga dapat mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya (Wibowo, 2013).

Ekonom Islam Taqiudin Ahmad ibn al-Maqrizi menggolongkan inflasi ke dalam dua bentuk:

a. Inflasi Alami (*Natural Inflation*)

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya, dan inflasi ini diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregat (AS) atau naiknya Permintaan Agregat (AD) (Wibowo, 2013). Penyebab *natural inflation* dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misalnya jumlah barang dan jasa turun tetapi jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang tetap, maka konsekuensinya harga barang meningkat.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang beredar turun. Apabila kondisi ini berlaku sedangkan kecepatan peredaran uang dan jumlah barang dan jasa tetap, maka harga akan meningkat.

b. Inflasi karena kesalahan manusia (*Human Error Inflation*)

Human Error Inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Penyebab *human error inflation* dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk
- 2) Pajak yang berlebihan

Dalam mengatasi inflasi, Ekonomi Islam juga memberikan solusi untuk menjaga kestabilan moneter tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- a. Melarang adanya transaksi yang bersifat gharar, seperti judi dan riba
- b. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk dialokasikan pada kegiatan ekonomi produktif.
- c. Menetapkan fungsi bank sentral secara optimal, dalam hal ini di Indonesia telah diberlakukan instrumen-instrumen pengendali moneter khusus perbankan syariah seperti : Giro Wajib Minimum, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA), dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Wibowo, 2013).

2.5.1.2 Dampak Inflasi

Dampak Inflasi sangat berpengaruh terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return On Asset* (ROA). Inflasi termasuk salah satu indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan jurnal ilmiah dari Sahara (2013), Inflasi berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) BPRS. Kenaikan inflasi ini akan diikuti dengan kenaikan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah, yang akan meningkatkan profitabilitas BPRS dari sisi *Return On Asset* (ROA).

2.5.2 Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Dalam sistem keuangan Islam, penelitian empiris sejauh ini yang telah dilakukan untuk menganalisis tingkat efisiensi, superioritas dan stabilitas bank-bank Islam dibandingkan bank-bank konvensional untuk mencapai target fungsi intermediasi moneter yang difokuskan pada pencapaian kesinambungan pertumbuhan riil ekonomi, penurunan inflasi dan pengangguran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang tidak menggunakan bunga (*interest-free banking system*) adalah lebih unggul dalam mencapai target moneter. Sementara itu Siregar (2010) menemukan bahwa tidak ada bukti secara empiris yang menunjukkan keunggulan dan stabilitas sistem bank non-riba dibandingkan dengan bank yang menggunakan riba (*interest based banking system*) (Siregar, 2010).

Selanjutnya, Hafas dan Mulyani (2011) dalam penelitiannya tentang kontribusi perbankan Islam terhadap perekonomian Malaysia menemukan adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh bank-bank Islam. Penelitian secara empiris yang membahas secara spesifik hubungan sektor keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas sekali. Sementara itu dalam konteks Indonesia, penelitian empiris tentang hubungan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah banyak dilakukan. Hidayati (2011) menginvestigasi hubungan kausalitas antara sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan sektor perbankan dan pasar modal sebagai representasi sektor keuangan, Hidayati menggunakan *impulse respon function and variance decomposition* dan menemukan bahwa perubahan pada sektor perbankan lebih berperan dalam menjelaskan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan perubahan pada pasar modal.

Secara parsial pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh variabel PE menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Sebagai ukuran profitabilitas, ROA sangat penting untuk menilai seberapa besar suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari asset-aset yang digunakannya. Dalam penelitian ini variabel PE dan JUB yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA (Rizki, 2016). Pertumbuhan ekonomi provinsi berperan menjelaskan fenomena baik buruknya kondisi ekonomi masyarakat. Variabel Pertumbuhan Ekonomi bisa mengcapture kondisi keuangan masyarakat. Semakin besar Pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut mampu untuk memproduksi dan menghasilkan uang, sehingga dapat pula menjadi tolok ukur untuk mengukur risiko eksternal pengembalian pembiayaan dari BPRS (Rizki, 2016)

2.6 Variabel Pengukur Risiko Kinerja BPRS

2.6.1 Total Aset (*Size*)

Aset perusahaan merupakan salah satu tolok ukur yang menunjukkan kinerja perusahaan. Semakin besar total aset BPRS, maka akan semakin besar kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin besar total aset BPRS akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Jadi, aset BPRS yang lebih besar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sehingga, BPRS akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi daripada BPRS yang asetnya kecil (Hashemi, 2012). Triwulandari (2013) juga mengatakan bahwa peningkatan ROA karena dipengaruhi oleh total aset perusahaan yang menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar pula aset yang dimiliki dan perusahaan maka akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya aset yang didapat atau laba yang diterima.

$$Size = \frac{Profit}{ROA} \times 100\%$$

Dengan meningkatkan laba itu akan menjadi daya tarik bagi investor atau calon investor untuk menginvestasikan dana mereka ke BPRS. Sehingga, dengan banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi maka akan menyebabkan permintaan saham BPRS meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Dan hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pengembalian aset (ROA). Setelah kenaikan harga saham, imbal hasil yang diperoleh investor dari saham ini juga meningkat (Brigham, 2013).

2.6.2 Kepemilikan (*Ownership*)

2.6.2.1 Kepemilikan Pemerintah

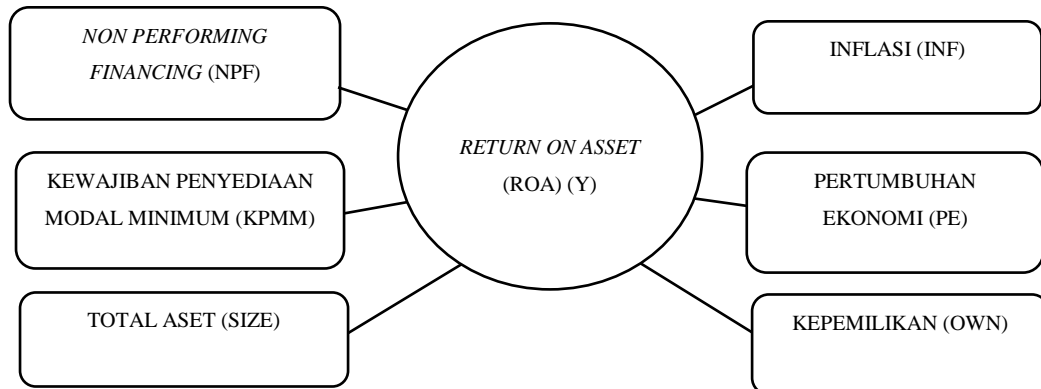
Dalam teori keagenan, hubungan agen didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus atau manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut tersebut pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut secara maksimal (Bustami, 2011).

Teori ini berkaitan dengan kepemilikan pemerintah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Dalam perannya, perusahaan yang dimiliki pemerintah memiliki *social motives*, disamping menghasilkan profit, pemerintah juga memiliki motif sosial (melayani masyarakat). Untuk memajukan perusahaannya, pemilik pemerintah juga dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji dan tunjangan. Dengan adanya *monitoring cost* tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan bersama (Fahmi, 2011).

2.6.2.2 Kepemilikan Swasta

Dalam Teori Prinsipal pada kepemilikan perusahaan swasta, terdapat *owners* yang jelas yaitu pemilik modal atau pemegang saham dimana manajer sebagai agen harus bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Dengan adanya pengawasan yang jelas maka manajer dipaksa untuk bisa membawa perusahaan agar memiliki kinerja yang baik. Namun pada perusahaan BUMN, tidak terdapat pemilik yang jelas karena mayoritas kepemilikan perusahaan berada di tangan negara. Hal ini dapat menjadi disinsentif bagi manajer sehingga merasa tidak perlu membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik. Pada sektor swasta sudah jelas bahwa manajemen perusahaan sebagai agen harus loyal dan tunduk kepada pemilik yaitu pemegang saham. Akan tetapi kekurangan untuk BUMN, tidak terdapat sosok pemilik yang jelas sehingga menjadi kurang bagi manajemen BUMN harus loyal kepada perusahaan sehingga akan berpengaruh langsung terhadap *Return on Asset* (ROA) (Fahmi, 2011).

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang mencerminkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat (Widarjono, 2018).

2.8.1 Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang *Non Performing Financing (NPF)*, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.2 Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.3 Pengaruh Inflasi terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Inflasi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Pertumbuhan Ekonomi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.5 Pengaruh Total Aset terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Total Aset, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

2.8.6 Pengaruh Kepemilikan terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tentang Kepemilikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan pemerintah dan signifikan negatif kepemilikan swasta terhadap kinerja BPRS di Indonesia pada periode Maret 2013-Desember 2017.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka (Widarjono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder dan berbentuk data Panel. Menurut Basuki (2017), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan.

Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah data kuartalan pada periode bulan Maret 2013-Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistika (BPS). Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada sampel yang akan diuji, yaitu menggunakan satu sampel BPRS pada setiap provinsi. Sampel yang diambil merupakan sampel yang mempunyai aset paling besar dan kinerja paling baik dalam setiap provinsi. Berikut tabel daftar sampel BPRS tersebut:

Tabel 3.1 Daftar BPRS

No	Nama Bank	Provinsi	Kepemilikan
1	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Jawa Barat	Swasta
2	PT BPRS Harta Insan Karimah	Banten	Swasta
3	PT BPRS Cempaka Al Amin	DKI Jakarta	Swasta
4	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	D.I. Yogyakarta	Swasta
5	PT BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali	Bali	Swasta

6	PT BPRS Safir	Bengkulu	Swasta
7	PT BPRS Baiturrahman	Nanggroe Aceh Darussalam	Swasta
8	PT BPRS Syarikat Madani	Kepulauan Riau	Swasta
9	PT BPRS Ampek Angkek Candung	Sumatera Barat	Swasta
10	PT BPRS Hasanah	Riau	Swasta
11	PT BPRS Al Falah	Sumatera Selatan	Swasta
12	PT BPRS Barkah Gemadana	Kalimantan Selatan	Swasta
13	PT BPRS Ibadurrahman	Kalimantan Timur	Swasta
14	PT BPRS Indo Timur	Sulawesi Selatan	Swasta
15	PT BPRS Nurul Ikhwan	Sulawesi Barat	Swasta
16	PT BPRS Tulen Amanah	Nusa Tenggara Barat	Swasta
17	PT BPRS Puduarta Insani	Sumatera Utara	Pemerintah
18	PT BPRS Bahari Berkesan	Maluku Utara	Pemerintah
19	PT BPRS Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah
20	PT BPRS Bandar Lampung	Lampung	Pemerintah
21	PT BPRS Bhakti Sumekar	Jawa Timur	Pemerintah

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ialah pengertian variabel yang digambarkan dalam definisi konsep secara operasional. Berikut tabel definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Definisi Variabel

No	Variabel	Definisi
1	<i>Return on Asset</i> (ROA)	Adalah Hasil pengembalian aset yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Dumawi, 2012).
2	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Adalah rasio pembiayaan bermasalah yang digunakan untuk mengukur tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan oleh bank (Wibowo, 2013).
3	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Adalah persentase dari modal primer lembaga keuangan terhadap asetnya dan digunakan sebagai ukuran kekuatan dan stabilitas keuangannya (Asikhia, 2013).
4	Inflasi (Inf)	Adalah keadaan dimana naiknya harga barang-barang secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu (Mankiw N, 2018).
5	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Adalah suatu proses perubahan dalam kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Mankiw N, 2018).
6	Total Aset (Size)	Adalah jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva lain-lain, yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas dalam periode tertentu (Kasmir, 2014).
7	Kepemilikan (Own)	Adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki mayoritas saham dan memperoleh kuasa untuk memegang kontrol terhadap sesuatu perusahaan untuk mencapai kejayaan perusahaan (Noviawan, 2013).

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif yang menggunakan teknik analisis data secara statistik, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dan penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh : NPF, KPMM, Size, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kepemilikan terhadap Kinerja BPRS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel yang berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program komputer (*software*) *Eviews* versi 10. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

3.3.1 Estimasi Model

Analisis awal dalam menganalisis data panel adalah menggunakan model estimasi *Common Effect Model* (CEM), model estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) dan model estimasi *Random Effect Model* (REM). Penelitian ini akan memilih metode terbaik dalam menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Variabel dependen yang digunakan dalam mengukur kinerja perbankan syariah adalah *Return on Asset* (ROA). Sedangkan variable independen yang digunakan adalah *Non-Performing Financing* (NPF), KPMM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan total aset (Size). Model penelitian ini adaah sebagai berikut ;

$$Profitability_{it} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{it} + \beta_2 KPMM_{it} + \beta_4 Inf_{it} + \beta_5 PE_{it} + \beta_2 Lnsiz_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Profitability _{it}	= ROA BPRS <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
NPF _{it}	= Risiko kredit BPRS <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
KPMM _{it}	= Risiko Tingkat Kesehatan BPRS <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
Inf _{it}	= Inflasi tingkat provinsi <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
PE _{it}	= Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
Lnsiz	= Log total asset BPRS <i>i</i> pada kuartal <i>t</i>
ε _{it}	= Error-term

3.3.2 Pemilihan Model

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CEM, FEM atau REM) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: Chow Test dan Hausman Test

3.3.3 Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara CEM dan FEM (Basuki, 2017).

$H_0 : \beta_1 > 0.05$ (Model terpilih CEM)

$H_a : \beta_1 < 0.05$ (Model terpilih FEM)

Jika nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi atau alpha 5% (> 0.05), maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Tetapi jika nilai probabilitas (Prob.) untuk Cross-section F nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alpha 5% (< 0.05) maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.3.4 Hausman Test

Uji ini dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) (Basuki, 2017).

$H_0 : \beta_1 > 0.05$ (Model terpilih REM)

$H_a : \beta_1 < 0.05$ (Model terpilih FEM)

Jika nilai probabilitas (Prob.) Cross-section random nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi atau alpha 5% (> 0.05), maka model yang terpilih adalah REM. Tetapi jika nilai Prob. *Cross-section random* lebih kecil dari tingkat signifikansi atau alpha 5% (< 0.05) maka model yang terpilih adalah FEM. Jika didapati bahwa estimasi model REM lebih baik daripada model FEM dan CEM, maka yang dipilih adalah REM dengan tanpa harus dilakukan uji selanjutnya (LM Test) (Basuki, 2017).

3.3.5 Uji Evaluasi Hasil

3.3.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen atau disebut uji signifikansi model. Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). (Widarjono, 2018)

Menurut Basuki (2017), Langkah-langkah dalam melakukan Uji F adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Hipotesis yaitu Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif
 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots \beta_k = 0$ (tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)
 $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots \beta_k \neq 0$ (ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen)
- b. Mencari Nilai F hitung dan F Kritis. Nilai F kritis dapat dilihat pada tabel distribusi F, nilai F kritis disesuaikan dengan besaran α dan df yang mana besarnya ditentukan dari *numerator* (k-1) dan df dari *denominator* (n-k).
- c. Keputusan menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut :
Apabila F Hitung lebih besar dari F kritis, maka kita menolak H_0 yang artinya ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, apabila F Hitung kurang dari F Kritis maka kita gagal menolak H_0 yang artinya tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain dengan melihat F hitung dan F kritis, keputusan menolak atau gagal menolak H_0 juga bisa dilihat dari nilai probabilitas F hitung dan dibandingkan dengan nilai α . Apabila Probabilitas F hitung < nilai α , maka menolak H_0 yang artinya ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila Probabilitas F hitung > nilai α maka gagal menolak H_0 yang artinya tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2.1.1 Uji t

Uji t adalah uji yang digunakan untuk melihat pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen. Perbedaan antara uji t pada regresi sederhana dan regresi berganda adalah terletak pada besarnya derajat *degree of freedom (df)* yang mana untuk regresi sederhana *df*nya sebesar $n-2$ sedangkan regresi berganda tergantung pada jumlah variabel independen yang ditambah dengan konstanta yaitu $n-k$. (Widarjono, 2018)

Menurut Widarjono (2018), langkah-langkah uji T adalah sebagai berikut :

1. Membuat Hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a) sebagai berikut :

a. Uji Hipotesis positif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

b. Uji Hipotesis negatif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 < 0$$

c. Atau uji dua sisi

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

d. Ulangi langkah pertama untuk β_2 dan seterusnya

e. Menghitung nilai t hitung masing-masing variabel independen dan mencari nilai t kritis yang dilihat melalui table distribusi t. Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_{1*}}{Se(\beta_1)}$$

Dimana * adalah nilai pada hipotesis H_0

f. Keputusan menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut :

Apabila t hitung lebih besar dari t kritis, maka kita menolak H_0 yang artinya ada pengaruh secara parsial variabel Independen terhadap variabel Dependen. Dan sebaliknya, apabila t hitung kurang dari t kritis maka kita gagal menolak H_0 yang artinya tidak ada pengaruh secara parsial variabel

independen terhadap variabel dependen. Selain dengan melihat t hitung dan t kritis, keputusan menolak atau gagal menolak H_0 juga bisa dilihat dari nilai probabilitas t hitung dan dibandingkan dengan nilai α . Apabila Probabilitas t hitung $<$ nilai α maka menolak H_0 yang artinya ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dan apabila Probabilitas t hitung $>$ nilai α maka gagal menolak H_0 yang artinya tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.5.2 Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Widarjono (2018), uji Koefisien Determinasi (*R-Squared*) adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Apabila nilai koefisien determinasi (*R-squared*) pada suatu estimasi mendekati angka satu (1), maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen dijelaskan dengan baik oleh variabel independennya. Dan sebaliknya, apabila koefisien determinasi (*R-Squared*) menjauhi angka satu (1) atau mendekati angka nol (0), maka semakin kurang baik variabel independen menjelaskan variabel dependennya.

3.2.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.2.1 Uji Normalitas

Menurut Widarjono (2018) uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji t hanya bisa dikatakan valid apabila residualnya memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi residual memiliki distribusi normal atau tidak adalah dengan uji yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (J-B). Metode J-B ini berdasarkan pada sampel besar dengan asumsi bersifat *asymptotic*. Uji statistik dengan metode J-B menggunakan perhitungan *skewness* dan *kurtosis* dengan formula sebagai berikut :

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right]$$

Dimana S = koefisien skewness

K = koefisien kurtosis

Apabila variabel didistribusikan dengan normal maka nilai koefisien S nya adalah 0 dan K nya adalah 3. Oleh karena itu, apabila residual berdistribusi secara normal maka nilai statistik JB diharapkan akan sama dengan nol (0). Nilai statistik JB sendiri berdasarkan distribusi *Chi squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sama dengan dua (2). Hipotesis pada uji Jarque Bera adalah sebagai berikut :

Ho : residual mempunyai distribusi normal

Ha: residual tidak mempunyai distribusi normal

Apabila nilai probabilitas ρ dari statistik JB lebih besar daripada $\alpha = 5\%$ atau dengan kata lain nilai statistiknya tidak signifikan maka kita menolak Ha atau gagal menolak Ho yang artinya residual memiliki distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati nol (0). Sebaliknya apabila nilai probabilitas ρ dari statistik JB lebih kecil daripada $\alpha = 5\%$ atau dengan kata lain nilai statistiknya signifikan maka kita menolak Ho atau menerima Ha yang artinya residual tidak memiliki distribusi normal karena nilai statistik JB tidak sama dengan nol (0).

3.2.2.2 Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier yang terjadi antara variabel independen di dalam suatu regresi. Adanya Multikolinieritas masih menghasilkan estimator BLUE, tetapi bisa menyebabkan varian yang besar pada suatu model sehingga akan sulit untuk mendapatkan estimasi yang tepat. Hal ini juga menyebabkan interval estimasi yang besar dan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu melalui uji t. Walaupun tidak berpengaruh, namun nilai koefisien determinasi R^2 masih bisa tinggi. Gejala multikolinieritas salah satunya dapat kita lihat dari koefisien determinasi (R^2) yang tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara uji t (Widarjono, 2018). Terjadi hal yang kontradiktif, dimana secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, tetapi secara individu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Selain melalui R^2 . Gejala adanya multikolinieritas juga dapat dilihat melalui perbandingan F statistik dibanding F kritis, yang mana ketika nilai F statistik lebih besar daripada F kritis dengan signifikansi α tertentu maka

terdapat multikolinieritas yang artinya ada hubungan liner antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya, dan sebaliknya apabila f statistik lebih kecil daripada F kritis maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Widarjono, 2018).

3.2.2.3 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Varian pada variabel gangguan haruslah konstan (Homoskedastisitas) dan apabila tidak konstan disebut dengan Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah variabel gangguan yang memiliki varian yang tidak konstan (Widarjono, 2018). Adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$E(e_i) = \sigma_i^2$$

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Breusch-Pagan yang tidak memerlukan asumsi adanya normalitas pada variabel gangguan.

Uji Heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan* didasarkan pada distribusi *chi-squares*. Apabila nilai *chi-square* hitung $>$ nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan (α) 1%, 5%, 10% maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika *chi square* hitung $<$ nilai χ^2 kritis maka tidak ada heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya CEM dan FEM saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, sedangkan REM tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi CEM dan FEM masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sedangkan REM sudah menggunakan Generalize Least Square (GLS) yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Untuk membandingkan apakah CEM terjadi heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil antara model CEM tanpa pembobotan (unweighted) dan model CEM dengan pembobotan (weighted).

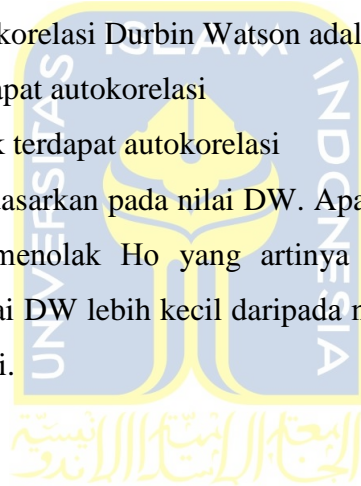
3.4.3.4 Autokorelasi

Menurut Widarjono (2018), Autokorelasi merupakan keadaan dimana adanya korelasi antara variabel gangguan suatu observasi dengan observasi lainnya. Autokorelasi bisa positif ataupun negatif. Tetapi pada data *time series* biasanya menunjukkan adanya autokorelasi yang positif daripada negatif. Hal ini dikarenakan pada data *time series* sering menunjukkan ada tren yang sama yaitu ada kesamaan pergerakan antara naik dan turun. Sedangkan untuk data panel jika model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM), maka pengujian dapat dikatakan selesai. Disebabkan, metode REM yang menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) dapat mengabaikan persoalan pelanggaran asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) (Ghozali, 2013). Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat menggunakan uji Autokorelasi Durbin Watson adalah sebagai berikut :

$H_0 : d < d_L$, terdapat autokorelasi

$H_a : d > d_U$, tidak terdapat autokorelasi

Uji autokorelasi ini didasarkan pada nilai DW. Apabila nilai DW lebih besar dari nilai α maka gagal menolak H_0 yang artinya tidak ada autokorelasi. Dan sebaliknya, apabila nilai DW lebih kecil daripada nilai α maka menolak H_0 yang artinya ada autokorelasi.



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan penjelasan secara deskripsi mengenai data masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk data panel dan data yang digunakan berupa data kuartalan dari tahun 2013 Q:1 sampai 2017 Q:4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

- a. *Return on Asset (ROA) (Y₁)* : *Return on Asset* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4

2. Variabel Independen

- a. *Non Performing Financing (NPF)* : *Non Performing Financing BPRS di Indonesia* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4
- b. *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)* : *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPRS di Indonesia* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4
- c. *Inflasi (Inf)* : *Inflasi tingkat provinsi Indonesia* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4
- d. *Pertumbuhan Ekonomi (PE)* : *Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi Indonesia* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4
- e. *Total Aset (Lnsiz)* : *Log total aset BPRS di Indonesia* tahun 2013 Q:1 – 2017 Q:4

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penggunaan model regresi tepat dan menghasilkan *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*. Pengujian ini bertujuan agar tidak ada gangguan seperti masalah autokorelasi,

multikolinieritas dan masalah heteroskedastisitas sehingga menunjukkan hubungan yang valid. Berikut hasil pengujian asumsi klasik:

4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji untuk melihat residual mempunyai distribusi normal apa tidak. Hal ini dilakukan karena uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji t hanya bisa dikatakan valid apabila residual memiliki distribusi normal. Untuk uji normalitas, penulis menggunakan uji Jarque-Bera dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data tidak berdistribusi normal

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera

	ROA
Jarque-Bera	475473.2
Probability	0.000000

Berdasarkan hasil uji Normalitas diatas didapatkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.0000 yang artinya probabilitas lebih kecil dari α (5%) maka menolak Ho yang artinya data berdistribusi tidak normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu model persamaan. Untuk melihat apakah model mengandung masalah multikolinieritas dengan cara membandingkan koefisien korelasi antar variabel independen (Widarjono, 2018).

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

	NPF	KPMM	Inf	PE	Lnsize
NPF	1.000000	-0.033778	0.054026	0.037409	0.008961
KPMM	-0.033778	1.000000	-0.030722	0.133307	-0.086487
Inf	0.054026	-0.030722	1.000000	-0.021095	0.140377
PE	0.037409	0.133307	-0.021095	1.000000	-0.083034
Lnsize	0.008961	-0.086487	0.140377	-0.083834	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengandung masalah multikolinieritas, dengan melihat koefisien korelasinya tidak ada yang melebihi 0.8 yang artinya tidak ada hubungan linier antar variabel independen (Basuki, 2017).

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel gangguan satu observasi dengan observasi yang lain dalam model yang digunakan (Basuki, 2017). Untuk uji autokorelasi, penulis menggunakan uji Durbin-Watson dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : d < d_L$, terdapat autokorelasi

$H_a : d > d_U$, tidak terdapat autokorelasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Kinerja BPRS (ROA)	
Durbin-Watson Stat	2.002472

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, dapat dianalisis bahwa variabel penelitian ini tidak terdapat autokorelasi karena nilai DW lebih besar dari nilai DU ($2.002472 > 1.62274$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari autokorelasi.

4.3 Uji Data Panel

4.3.1 Analisis Data

4.3.1.1 Hasil estimasi Model Common Effect (CEM)

Tabel 4.4 Hasil estimasi *Common Effect Model* (CEM)

Variable	ROA	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
NPF	-4.30E-06	-0.198780
KPMM	0.026354	1.073184
Inf	0.126970	0.304909
PE	1.858647	3.721301*
Lnsize	0.277233	0.431409
R-squared	0.038021	
Adjusted R-squared	0.026403	
F-statistic	3.272539	
Prob(F-Statistic)	0.006549	
Durbin-Watson Stat	1.872786	
Total panel (balanced) observations	420	

Keterangan: signifikansi variabel α 1% (*), α 5% (**), α 10% (***)

4.3.1.2 Hasil estimasi Model Fixed Effect (FEM)

Tabel 4.5 Hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	ROA	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
NPF	-2.06E-06	-0.096288
KPMM	0.024944	0.986763
Inf	0.249695	0.407806
PE	1.113982	1.767981***
Lnsize	-2.287793	-1.386768
R-squared	0.144140	
Adjusted R-squared	0.089835	
F-statistic	2.654237	

Prob(F-Statistic)	0.000039
Durbin-Watson Stat	2.101379
Total panel (balanced) observations	420

Keterangan: signifikansi variabel α 1% (*), α 5% (**), α 10% (***)

4.3.1.3 Uji Chow

Uji Chow merupakan sebuah pengujian untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) yang tepat dijadikan metode analisis, atautkah *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho = Jika Chi Square $> 0,05$, maka model yang terbaik adalah CEM.

Ha = Jika Chi Square $< 0,05$, maka model yang terbaik adalah FEM.

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Probability</i>
Cross-section Chi-square	0.0003

Berdasarkan hasil uji Chow diatas, ROA mendapatkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.0003 yang artinya probabilitas lebih kecil dari α (5%) maka menolak Ho yang artinya model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, untuk memperoleh model terbaik dilanjutkan dengan mengestimasi REM yang akan dibandingkan dengan FEM.

4.3.1.4 Hasil Estimasi Random Effect Model

Tabel 4.7 Hasil estimasi Random Effect Model (REM)

Variable	ROA	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
NPF	-2.93E-06	-0.138241
KPMM	0.025566	1.036855
Inf	0.275731	0.556329
PE	1.478031	2.632416*

Lnsize	-0.296468	-0.325711
R-squared	0.021333	
Adjusted R-squared	0.009514	
F-statistic	1.804919	
Prob(F-Statistic)	0.110675	
Durbin-Watson Stat	2.002472	
Total panel (balanced) observations	420	

Keterangan: signifikansi variabel α 1% (*), α 5% (**), α 10%(***)

4.3.1.5 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan sebuah pengujian untuk menentukan model yang terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho = Jika Chi Square $> 0,05$, maka model yang terbaik adalah REM

Ha = Jika Chi Square $< 0,05$, maka model yang terbaik adalah FEM

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

<i>Effect Test</i>	<i>Probability</i>
Cross-section Random	0.5003

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas didapatkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0.5003 yang artinya probabilitas lebih besar dari α (5%) maka gagal menolak Ho yang artinya model terbaik adalah REM.

4.4 Pembahasan

Tabel 4.9 Tabel Hasil Estimasi Kinerja BPRS

Variable	ROA	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
NPF	-2.93E-06	-0.138241

KPMM	0.025566	1.036855
Inf	0.275731	0.556329
PE	1.4780311	2.632416*
Lnsize	-0.296648	-0.325711
R-squared	0.021333	
Adjusted R-squared	0.009514	
F-statistic	1.804919	
Prob(F-Statistic)	0.110675	
Durbin-Watson Stat	2.002472	
Total panel (balanced) observations	420	

Keterangan: signifikansi variabel α 1% (*), α 5% (**), α 10% (***)

4.4.1 Uji F (Uji Secara Bersama)

Hipotesis yang digunakan untuk Uji F adalah sebagai berikut:

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

H_a : variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil estimasi ROA dilihat dari nilai Prob(F-statistik) sebesar 0.110675 yang berarti nilai probabilitas F-statistik lebih besar daripada derajat keyakinan $\alpha=5\%$, yang berarti gagal menolak H_0 artinya bahwa hubungan secara bersamaan variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara serentak variabel *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), total aset (Size), Inflasi (Inf) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *Return on Asset* (ROA).

4.4.2 Uji t (Uji Secara Individu)

Hipotesis yang digunakan untuk Uji t adalah sebagai berikut;

H_0 : variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Ha : variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

1. Berdasarkan hasil estimasi diatas, dapat dilihat bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) nilai probabilitasnya sebesar 0.8901 yang berarti lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).
2. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat dilihat bahwa variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), nilai probabilitasnya sebesar 0.3004 yang berarti lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).
3. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat dilihat bahwa variabel Inflasi (Inf) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5783 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).
4. Berdasarkan hasil estimasi diatas, dapat dilihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0.0088 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).
5. Berdasarkan hasil estimasi diatas, dapat dilihat bahwa variabel Total Aset (Size) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7448 yang berarti lebih besar daripada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa gagal menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel total aset (Size) tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA).

4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi ROA diperoleh nilai R^2 sebesar 0.021333 yang artinya bahwa variasi variabel *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), total aset (Size), Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi hanya mampu menjelaskan variasi variabel *Return on Asset* (ROA) sebesar 2.133% dan sisanya sebesar 97.867% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.4.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan hasil estimasi diatas, variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai koefisien sebesar $-2.93E-06$ dan nilai probabilitasnya sebesar 0.8901 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, artinya bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini diperkirakan terjadi karena manajemen risiko BPRS sudah baik. BPRS memiliki kekhususan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga kecilnya *moral hazard* pada penyaluran pembiayaan BPRS. Oleh karena itu, pembiayaan yang bermasalah pada BPRS tidak begitu berpengaruh terhadap kinerjanya (Mutamimah dan Siti, 2012).

Menurut Sudarsono, H (2017) menjelaskan bahwa NPF tidak signifikan terhadap ROA dimungkinkan karena manajemen bank syariah kurang mempertimbangkan besaran NPF untuk menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan kepada mitra. Kemampuan manajemen bank yang baik berhasil mengendalikan NPF selama periode penelitian. Hal tersebut menjadi alasan NPF tidak memengaruhi pembiayaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini, Hanania, L (2015), Mulyaningsih, S dan Iwan, F. (2016) menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

4.4.5 Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Kinerja BPRS

Berdasarkan hasil estimasi dengan *Random Effect Model* (REM) diatas, variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) memiliki nilai koefisien sebesar 0.025566 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.3004 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, artinya bahwa variabel variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini diprediksikan karena BPRS masih dikategorikan bank kecil dengan rata-rata permodalan kecil (masih dibawah 1 triliun). Sehingga, KPMM tidak signifikan pada ROA (Novi Lidiawati, 2016). Hasil ini juga ditemukan oleh Hindarto (2011) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4.4.6 Pengaruh Inflasi terhadap kinerja BPRS

Berdasarkan hasil estimasi diatas, variabel Inflasi (INF) memiliki nilai koefisien sebesar 0.275731 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.5783 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, artinya bahwa variabel Inflasi (INF) memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini diperkirakan terjadi karena manajemen BPRS sudah baik sehingga lebih tidak rentan terhadap risiko inflasi. Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA diperkirakan karena rata-rata tingkat inflasi selama periode penelitian sebesar 5,86 %, dimana pasar bisa menerima tingkat inflasi di bawah angka 10%. Inflasi yang terjadi pada periode 2013-2017 yang cenderung stabil membuat perencanaan keuangan masyarakat lebih baik, daya beli terjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lebih lancar karena penanaman modal tidak bersifat spekulatif serta kredit tidak mengalami kemacetan. Sehingga inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA (Suryadi, 2014). Hasil ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Sahara (2013) dan Wibowo (2013) bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap kinerja BPRS.

4.4.7 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kinerja BPRS

Dari hasil estimasi *Random Effect Model* (REM), didapatkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 1.478031 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0088 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ artinya bahwa menolak H_0 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Hal ini diperkirakan terjadi karena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kinerja perekonomian masyarakat juga baik dan lancar, sehingga konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Masyarakat yang rata-rata membuka usaha sebagai pelaku UMKM memerlukan suntikan modal yang lebih dari BPRS untuk meningkatkan modal usahanya dan *capability to pay back* meningkat, sehingga pengembalian pembiayaan kepada BPRS juga lancar. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Sahara (2013) dan Rizki (2016), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS.

4.4.8 Pengaruh Total Aset (*Size*) terhadap kinerja BPRS

Merujuk pada hasil estimasi *Random Effect Model* (REM) diatas, menyatakan bahwa variabel Total Aset (*Size*) memiliki nilai koefisien sebesar -0.296468 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.7448 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, artinya bahwa variabel Total Aset (*Size*) memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Hubungan negatif dan tidak signifikan ini diperkirakan karena BPRS cenderung tidak menambah pembiayaan. Hal tersebut diperkirakan karena BPRS lebih berhati-hati dalam menghitung risiko peningkatan pembiayaan dan memiliki kewenangan yang cenderung *wait and see* dalam merespon gejala pasar, sehingga tidak optimal dalam menghasilkan keuntungan (Indrajaya, 2011). Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menyatakan bahwa *Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

4.4.9 Pengaruh Kepemilikan terhadap kinerja BPRS

Variabel dummy adalah variabel kualitatif yang dikuantitatifkan dengan memberikan nilai 1 dan 0. Yang mana nilai 1 diberikan kepada variabel yang akan dilihat pengaruhnya, dan nilai 0 diberikan kepada variabel yang tidak dilihat pengaruhnya (Basuki, 2017). Dalam penelitian ini variabel dummy yang dipakai adalah kepemilikan (*ownership*) antara BPRS milik pemerintah dan BPRS milik swasta. Pada regresi pertama digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel kepemilikan BPRS milik pemerintah dan regresi kedua digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel kepemilikan BPRS milik swasta. Berikut hasil estimasinya

Table 4.1.0 Hasil Estimasi Kepemilikan (*Dummy Variable*)

Variable	Kinerja BPRS (Pemerintah)		Kinerja BPRS (Swasta)	
	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
NPF	-1.77E-06	-0.083721	-1.77E-06	-0.083721
KPMM	0.023205	0.942034	0.023205	0.942034
Inf	0.162764	0.331473	0.162764	0.331473
PE	1.473852	2.651270*	1.473852	2.651270*
Lnsize	-0.743913	-0.807264	-0.743913	-0.807264
Own	7.763096	1.871277***	-7.763096	-1.871277***
R-squared	0.030471		0.030471	
Adjusted R-squared	0.016385		0.016385	
F-statistic	2.163307		2.163307	
Prob(F-Statistic)	0.045620		0.045620	
Durbin-Watson Stat	2.010805		2.010805	
Total panel (balanced) observations	420		420	

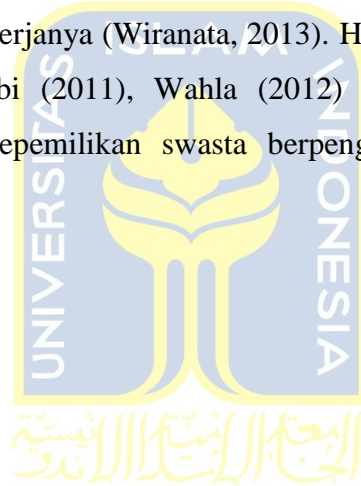
Keterangan: signifikasnsi model α 1% (*), α 5% (**), α 10%(***)

Dari hasil estimasi *Random Effect Model* (REM) diatas, variabel Kepemilikan (*Own*) BPRS milik Pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 7.763096 dan signifikan pada α 10%, yang artinya bahwa variabel Kepemilikan (*Own*) Pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Hal ini dimungkinkan karena BPRS milik pemerintah dalam menyalurkan pembiayaannya sudah terjalin dengan banyak lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, sehingga lebih mudah dalam penyaluran pembiayaan (Noviawan, 2013). Dalam data penelitian, meskipun BPRS milik pemerintah berjumlah sedikit, tetapi porsi pembiayaan BPRS milik pemerintah sangat besar, seperti contohnya BPRS Bhakti Sumekar yang pada kuartal 4 tahun 2017 memiliki piutang murabahah mencapai Rp 427 Miliar dengan membukukan nilai aset mencapai Rp 769 Miliar dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2016 yang memiliki piutang murabahah sebesar Rp 368 Miliar dengan membukukan nilai aset sebesar Rp 620 Miliar, yang berarti terjadi kenaikan piutang sebesar Rp 59 Miliar dari penyaluran pembiayaan murabahah. Oleh karena penyaluran pembiayaan BPRS milik Pemerintah sangat besar, maka kinerja BPRS milik Pemerintah juga sangat baik.

Penelitian Martsila dan Merianto (2013) juga menyatakan bahwa BPRS milik pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena BPRS milik pemerintah memiliki sistem pengawasan yang ketat dan prosedural administrasi yang ketat sehingga BPRS milik pemerintah memiliki risiko lebih kecil dan lebih optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Martsila et al, 2013). Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kumai (2014) yang menunjukkan bahwa BPRS milik pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS.

Dibandingkan dengan variabel Kepemilikan (*Own*) BPRS milik Swasta yang memiliki nilai koefisien sebesar -7.763096 dan signifikan pada α 10%, yang artinya bahwa variabel Kepemilikan (*Own*) Swasta memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Hal ini diprediksikan terjadi karena BPRS milik swasta rata-rata menyalurkan pembiayaan yang kecil dibandingkan BPRS milik pemerintah.

Dalam data penelitian, salah satu contoh BPRS swasta adalah BPRS Ibadurrahman yang pada kuartal 4 tahun 2017 memiliki piutang murabahah sebesar Rp 2.8 Miliar dengan pembukuan aset sebesar Rp 9.3 Miliar dibandingkan kuartal 4 tahun 2016 yang memiliki piutang murabahah sebesar 1.5 Miliar dengan pembukuan aset sebesar 8.8 Miliar, yang artinya terjadi peningkatan pembiayaan murabahah sebesar 1.3 Miliar. Ketika kenaikan pembiayaan murabahah ini dibandingkan dengan kenaikan pembiayaan BPRS milik pemerintah, misalnya dengan BPRS Bhakti Sumekar, kenaikan pembiayaan BPRS Ibadurrahman hanya sebesar 2 persen dari jumlah kenaikan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar. Sehingga karena BPRS milik swasta menyalurkan pembiayaan yang relatif kecil dibandingkan BPRS milik Pemerintah, hal tersebut dimungkinkan menjadi penyebab BPRS swasta berhubungan negatif dan signifikan terhadap kinerjanya (Wiranata, 2013). Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Kutubi (2011), Wahla (2012) dan (Koerniadi, 2012) yang menemukan bahwa kepemilikan swasta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.



BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data penelitian yang telah dilakukan penulis dengan *Random Effect Model* (REM), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaruh dari berbagai variabel independen risiko internal dan risiko eksternal BPRS yang dicerminkan oleh *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Total Aset (Size), Inflasi (Inf) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap variabel dependen Kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA) adalah

Pertama, variabel *Non Performing Financing* (NPF) berhubungan negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja BPRS. Hal ini diperkirakan terjadi karena manajemen risiko BPRS sudah baik. BPRS memiliki kekhususan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga kecilnya *moral hazard* pada penyaluran pembiayaan BPRS. Oleh karena itu, pembiayaan yang bermasalah pada BPRS tidak begitu berpengaruh terhadap kerjanya.

Kedua, variabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS. Hal ini dikarenakan BPRS masih dikategorikan bank kecil dengan rata-rata permodalan yang kecil (masih dibawah 1 triliun), sehingga dana dari pihak ketiga akan menjadi mahal dan biaya margin menjadi tinggi sehingga kinerja BPRS akan menurun.

Ketiga, variabel Inflasi (Inf) berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS. Hal ini diperkirakan terjadi karena manajemen BPRS sudah baik sehingga lebih tidak rentan terhadap risiko inflasi. Karena dalam periode penelitian inflasi cenderung stabil dan masih dapat diterima pasar, sehingga perencanaan keuangan masyarakat baik, daya beli terjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lebih lancar karena penanaman modal tidak bersifat spekulatif serta kredit tidak bermasalah. Oleh karena itu, inflasi tidak berpengaruh terhadap kinerja BPRS.

Keempat, variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja BPRS. Hal ini diperkirakan terjadi karena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kinerja perekonomian masyarakat juga baik dan lancar, sehingga konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Masyarakat yang rata-rata membuka usaha sebagai pelaku UMKM memerlukan suntikan modal yang lebih dari BPRS untuk meningkatkan modal usahanya dan *capability to pay back* meningkat, sehingga pengembalian pembiayaan kepada BPRS juga lancar.

Kelima, variabel Total Aset (*Size*) berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS, diperkirakan karena BPRS lebih berhati-hati dalam menghitung risiko peningkatan pembiayaan dan memiliki kewenangan yang cenderung *wait and see* dalam merespon gejolak pasar, sehingga BPRS tidak optimal dalam menghasilkan keuntungan.

Keenam, variabel Kepemilikan (*Own*) Pemerintah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Hal ini dimungkinkan karena BPRS milik pemerintah menyalurkan pembiayaan yang besar dan memiliki sistem pengawasan yang ketat dan prosedural administrasi yang ketat sehingga BPRS milik pemerintah memiliki risiko lebih kecil dan lebih optimal dalam meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan variabel Kepemilikan (*Own*) Swasta memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPRS yang dicerminkan oleh *Return on Asset* (ROA). Hal ini diprediksikan terjadi karena rata-rata jumlah penyaluran pembiayaan BPRS milik swasta lebih kecil daripada BPRS milik pemerintah. Sehingga dimungkinkan, BPRS swasta kurang optimal dalam meningkatkan kinerjanya.

5.2 REKOMENDASI

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor risiko internal maupun eksternal bank yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja perusahaan khususnya pada kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini merupakan analisis penulis terhadap variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Oleh karenanya, variabel-variabel ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menganalisis lebih lanjut tentang risiko-risiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan menghasilkan kebijakan yang baik untuk kemajuan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).



DAFTAR PUSTAKA

- Abba, G. O. (2013). Capital Adequacy Ratio and Banking Risks in the Nigeria Money Deposit Banks. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(17), pp. 2222-2847.
- Adegbite, E. O. (2010). The Nigerian Financial System: Emerging Issues and Global Relevance. *Journal Department of Finance University of Lagos*, 2(1), 233-248.
- Ahmet, & H. (2011). Determinant of capital adequacy ratio in Turkish Bank: A panel data analysis. *African Journal of Business Management*, 5(27), pp. 11199-11209.
- Almazari, A. (2014). Impact of internal factors on bank profitability: comparative study between Saudi Arabia and Jordan. *Journal of Applied Finance & Banking*, 5(1), pp. 125-140.
- Ardiansari, A. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas. *Management Analysis Journal*, 5(1), pp. 13-23.
- Asikhia, O. &. (2013). Capital Adequacy and Banks' Profitability: Empirical Evidence from Nigeria. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(10), pp. 87-93.
- Asyarbini, I. A. (2015). *Tafsir Sirajul Munir*. Kairo: Bulaq Al-Amiriyah.
- Baharuddin, e. a. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bashri, I. H. (2015). *Tafsir Al Mawardi*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Basuki, A. (2017). *Ekonometrika dan Aplikasi dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Danisa.
- Brigham, E. (2013). *Fundamentals of Financial Management (13th edition)*. Ohio: South-Western Cengage Learning.
- Bustami, G. (2011). *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta : Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.
- Dumawi, H. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan, Panduan bagi Akademisi, Manager, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Fakhrunnas, F., Wulandari., Mifrahi, M. N. (2018). Macroeconomic Effect And Risk-Taking Behavior in A Dual Banking System. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), pp. 165-176.
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanania, L. (2015). FEB Perbanas Institute. Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang, *Journal Perbanas*, 1(1), pp. 151-168.
- Harley, T. W. (2011). Determinant of Capital Adequacy in the Banking Sub sector of the Nigerian Economy: Efficacy of Camels (A Model Specification with Co Integration Analysis). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 1(3), pp. 233-248.
- Hashemi, S. Z. (2012). The Impact of Financial Leverage Operating Cash Flow and Size of Company on Dividend Policy. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business*, 3(10), pp. 264-270.
- Hassan, M. K. (2013). Determinants of Islamic banking profitability. *10th ERF Annual Conference Morocco*, 1(15) pp. 1-18.
- Hendro SP, T. C. (2014). *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: YKPN.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Hindarto, C. (2011). Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, Bopo Dan KAP Terhadap Return On Asset. *Jurnal Bisnis Strategi*, 20(2), pp. 15-21.
- Hosen, M. (2013). Efficiency of the Sharia Rural Bank in Indonesia Lead to Modified Camel. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 2(5) pp. 2226-3624.
- Houston, E. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essentials of Financial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrajaya. (2011). Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal : Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(6), pp. 1-18.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, M. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Koerniadi, H. a.-R. (2012). Does Board Independence Matter? Evidence from New Zealand. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(2), pp. 1-16.
- Kumai, B. L. (2014). The Impact of ownership Structure on the Financial Performance of Listed Insurance Firms in Nigeria. *International . Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 4(1), pp. 409–416.
- Kutubi, S. S. (2011). Board of Director's Size, Independence and Performance: An Analysis of Private Commercial Banks in Bangladeshi. *World Journal of Social Sciences*, 1(4), pp. 159-178.
- Mankiw N, G. d. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martsila, I. S. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), pp. 1-14.
- Mutamimah dan Siti. (2012). Analisis Eksternal dan Internal dalam menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 19(1), pp. 14-25.
- Mulyaningsih, S. dan Iwan, F. (2016). Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Nasional UMP*, 16(1), 22-37.
- Novi Lidiawati, N. F. (2016). Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 15(3), pp. 313-331.
- Noviawan, R. A. (2013). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), pp. 1-10.
- OJK. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/POJK.03 BPRS*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2018). *Statistika Perbankan Syariah September*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Prasanjaya, A. Y. (2013). Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1), pp. 230-245.
- Prasetyoningrum, A. K. (2010). Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Walisongo*, 12(1), pp. 75-86.

- Rizki, K. (2016). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *I-Economic Journal*, 2(1), pp. 50-64.
- Romdhane, M. (2012). The Determinants of Banks' Capital Ratio in Developing Countries: Empirical Evidence from Tunisia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(1), pp. 35-46.
- Sahara, Y. A. (2013). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(1), pp. 149-157.
- Said, S. (2015). Sharia Banking Performance In Makassar. *Journal Al-Ulum*, 15(1), pp. 21-42.
- Samson, O. W. (2012). An Empirical Analysis of Capital Adequacy in the Banking Sub-Sector of the Nigeria Economy. *International Journal of Economics and Finance*, 4(5), pp. 208-215.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Shinta Dewi Vernanda, E. T. (2016). Analisis Pengaruh Car, Ldr, Npl, Bopo, Dan Size Terhadap ROA. *Journal of Management Diponegoro Univeristy*, 5(3), pp 1-13.
- Siddiqua, A., Chowdhury, A. N. M. M. H., Sayed, A., & Haque, M. (2017). Impact of Internal Factors on the Profitability of Banks: A Case of Commercial Banks in Bangladesh, *2613(2005)*, pp. 7-14.
- Siregar, S. (2010). *Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), pp. 1-15.
- Sudarsono, H. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 175-203.
- Suryadi, G. (2014). Analisis pembiayaan sektor perdagangan hotel dan restoran pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 2(2), 1-17.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Triwulandari, R. A. (2013). Analisis Pengaruh Beta, Ukuran Perusahaan (SIZE), EPS, dan ROA Terhadap Return Saham Perusahaan Consumer Goods Periode 2008-2012. *Jurnal Manajemen, STIE MDP Palembang*, 1(14), pp. 1-14.
- Trujillo-Ponce, A. (2013). What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. *Accounting and Finance Afaanz Journal*, 53(2), pp. 561-586.

- Wahla, R. (2012). Impact of Ownership Structure on Firm Performance Evidence from Non-Financial Listed Companies at Karachi Stock Exchange. *International Research Journal of Finance and Economics*, 1(3), pp: 7-13.
- Wibowo, E. S. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi UNDIP*, 2(2), pp. 1-10.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika 4th Edition*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiranata, Y. A. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15 (1), pp: 15-26.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Data Penelitian

Tahun	Q	ROA_y	NPF_x	KPMM_x	Size_x	INF_x	PE_x
2013	1	0.53	4.66	26	107,959,580	5.81	5.9
2013	2	0.9	5.43	21	119,566,783	6.7	6.2
2013	3	1.00	8.62	16	122,460,449	9.2	5.6
2013	4	1.94	5.17	12	131,834,177	9.15	6.3
2014	1	0.54	5.38	20	133,056,042	7.53	5.5
2014	2	3.2	6.98	23	135,663,873	6.08	5.67
2014	3	1.4	6.89	20	139,915,672	3.86	5.61
2014	4	2.7	4.94	16	150,577,760	7.41	5.07
2015	1	2.5	5.82	15	154,414,905	5.46	4.93
2015	2	2.6	4.98	14	149,598,619	6.51	4.9
2015	3	2.8	6.48	15	150,867,455	6.11	5.03
2015	4	3.00	4.44	14	180,033,116	2.73	5.14
2016	1	2.7	4.87	14	191,332,755	3.78	5.08
2016	2	3.7	7.65	15	202,048,153	3.17	5.88
2016	3	4.3	15.6	14.2	226,133,669	2.54	5.76
2016	4	3.8	15.22	16	234,870,895	2.75	4.94
2017	1	4.00	18.48	15	240,769,938	2.2	5.24
2017	2	3.6	22.7	17	233,338,344	4.31	5.29
2017	3	2.1	25.83	17.32	225,485,110	3.87	5.19
2017	4	1.7	24.7	17.98	228,610,926	4.21	5.02
2013	1	4.3	3.69	14.49	291,172,976	1.1	5.72
2013	2	4.3	3.53	15.79	308,020,601	1.5	5.66
2013	3	4.4	4	16.02	323,795,401	0.55	5.7
2013	4	4.3	3.62	15.2	352,609,098	0.11	5.84
2014	1	4.3	4.2	14.85	342,116,643	0.06	5.2
2014	2	4.00	3.75	16	362,977,945	0.37	5.28
2014	3	3.8	3.26	15.6	382,750,318	0.48	5.21

2014	4	3.7	3.11	15.2	424,775,307	2.51	8
2015	1	4.8	3.26	14	424,087,483	0.36	5.69
2015	2	3.5	7.3	16	404,303,759	0.6	5.26
2015	3	3.5	7	15.9	422,951,759	0.08	5.9
2015	4	3.00	4.94	15.1	461,410,382	0.99	4.87
2016	1	3.00	5.62	16.9	468,259,800	0.1	5.15
2016	2	2.7	5.72	15.9	464,136,600	0.55	5.16
2016	3	-1.20	28.48	13.5	502,812,661	0.34	5.24
2016	4	-3.33	24.98	15.41	486,095,197	0.61	5.53
2017	1	-3.38	29.58	15.93	497,787,459	0.09	5.94
2017	2	-1.54	29.03	15.73	471,017,438	0.72	5.52
2017	3	1.83	24.59	16.16	484,078,615	0.25	5.62
2017	4	1.62	22.24	16.54	483,719,680	0.7	5.71
<hr/>							
2013	1	1.18	9.89	22.6	11,879,037	5.7	6.5
2013	2	2.73	6.55	23	10,646,111	5.67	6.3
2013	3	3.34	7.92	23	12,128,777	8.38	6.2
2013	4	3.65	10.8	24.23	11,768,977	8	5.6
2014	1	1.42	8.96	22	12,014,637	7.53	6.1
2014	2	2.82	11.23	20	12,723,188	7.09	6
2014	3	2.83	9.33	23	14,101,895	4.84	6
2014	4	3.85	9.68	23	14,793,234	4.5	6.2
2015	1	1.8	8.65	26	14,870,506	4.7	5.1
2015	2	1.96	10.19	26	15,109,879	7.59	5.2
2015	3	2.63	10.55	20	16,870,326	7.24	5.96
2015	4	2.65	9.67	21	16,471,250	5.96	6.48
2016	1	0.89	12.3	22.45	15,901,418	6.2	5.62
2016	2	1.93	10.93	21	15,537,891	3	5.86
2016	3	2.87	12.22	21.5	16,064,345	3	5.75
2016	4	3.45	11.99	18	17,006,396	2.37	5.51
2017	1	-0.78	12.99	19	19,763,695	3.43	6.48
2017	2	-0.35	12.58	18.25	19,811,120	3.94	5.96
2017	3	0.32	11.17	19.2	20,568,220	3.69	6.29
2017	4	0.93	15.03	20.16	20,655,418	3.77	5.19
<hr/>							
2013	1	-0.46	22.4	13.37	7,745,949	6.24	4.2
2013	2	-1.43	23	14.52	7,459,332	5.44	6.1
2013	3	-1.54	22.7	15.3	7,322,165	7.72	5.9
2013	4	0.44	6.77	15.08	7,193,633	7.98	5.6
2014	1	-0.22	7.5	13.04	7,911,499	7.08	5.3

2014	2	-4.97	23.86	6.08	8,114,942	7.26	5.2
2014	3	-7.87	21.43	2.35	8,994,886	5	5.69
2014	4	-3.97	22.13	2.66	7,888,545	8.22	6.16
2015	1	-0.99	23.2	11.4	7,253,895	8.43	5.5
2015	2	-0.79	24.56	11.1	7,574,868	7.31	4.8
2015	3	-11.87	51.93	11.15	7,829,736	8.2	5
2015	4	-5.39	8.88	12.37	7,944,382	2.73	6.1
2016	1	-0.56	15.02	8.91	11,482,129	4.21	5.1
2016	2	-0.55	10.4	13.17	15,930,594	2.96	5.74
2016	3	2.89	7.92	13.6	19,397,266	2.72	5.06
2016	4	1.61	4.86	21.86	27,147,319	2.36	5.33
2017	1	1.67	4.53	21.2	32,122,337	3.3	5.2
2017	2	5.37	5.46	18.42	43,233,907	4.61	5.18
2017	3	7.19	6.24	18.86	50,425,813	3.58	5.13
2017	4	4.4	3.99	22.17	61,052,245	4.11	5.24
<hr/>							
2013	1	-1.24	9.91	22.73	11,964,206	1.08	6.71
2013	2	-3.66	30.76	15.97	8,572,669	0.47	6.05
2013	3	-2.45	50.64	12.27	7,856,600	0.45	5.97
2013	4	-85.16	72.12	-47.6	6,351,677	0.49	5.49
2014	1	-4.72	74.65	-62.9	5,864,839	0.32	5.43
2014	2	-0.04	29.56	144.47	5,919,239	0.2	6.06
2014	3	-0.02	7.45	93	5,998,361	0.21	6.53
2014	4	1.58	5.65	80.41	6,011,941	1.99	7.88
2015	1	1.79	8.43	2.13	6,383,110	0.14	6.2
2015	2	1.83	7.42	94.36	7,062,020	0.61	6.02
2015	3	1.73	7.6	87.55	7,035,900	0.92	6.29
2015	4	-0.76	7.5	83.49	6,890,278	2.8	5.96
2016	1	-0.82	12.52	77.28	7,034,993	3.59	6.38
2016	2	-0.95	8.22	72.58	6,459,700	2.96	6.54
2016	3	-1.22	7.73	68.89	5,967,848	3.18	6.61
2016	4	-1.67	6.63	65.7	6,846,445	3.23	5.47
2017	1	-0.27	6.68	61.38	7,914,557	4.4	5.74
2017	2	-1.02	7.92	61.45	8,509,554	4.02	6.01
2017	3	-1.37	8.64	61.13	9,637,633	0.33	6.22
2017	4	0.00	9.83	0	8,575,665	1.07	6.19
<hr/>							
2013	1	5.4	13.61	8.56	87,910,553	7.44	5.53
2013	2	3.4	22.46	8.84	86,687,737	7.89	5.25
2013	3	2.9	23.86	8.64	83,090,524	9.54	5.69

2013	4	1.73	30.22	9.54	79,019,777	9.94	7.83
2014	1	0.14	34.19	10.19	76,799,128	8.35	7.78
2014	2	-0.08	25.61	10.75	73,266,131	5.79	5.86
2014	3	-0.49	35.83	6.24	67,172,368	6.05	5.14
2014	4	2.27	37.88	8.34	72,233,796	10.85	5.49
2015	1	0.03	31.84	11.88	75,040,535	7.65	5.44
2015	2	0.18	31.52	12.03	70,400,306	9.9	5.23
2015	3	0.81	33.37	11.63	66,699,452	8.65	5.17
2015	4	1.45	34.44	11.86	78,656,777	3.25	4.86
2016	1	0.22	32.18	10.92	82,539,188	5.93	4.99
2016	2	-0.67	33.12	9.34	85,596,859	5.47	5.41
2016	3	-0.46	31.19	9.27	97,301,501	4.62	5.19
2016	4	0.77	30.05	14.28	104,895,460	5	5.56
2017	1	1.61	29.86	13.37	112,899,805	6.01	5.21
2017	2	-1.18	53.58	10.31	117,383,487	6.2	5.32
2017	3	-2.21	52.04	10.65	118,930,739	5.86	5.46
2017	4	1.56	32.44	11.78	120,566,898	5.94	5.27
<hr/>							
2013	1	0.2	19.1	9.51	16,145,164	0.16	4.17
2013	2	0.56	15.93	9.75	15,323,206	1.23	3.89
2013	3	0.56	17.38	9.65	17,317,446	0.53	4.18
2013	4	0.85	20.29	18.87	19,196,127	0.3	3.82
2014	1	0.59	28.45	18.86	19,387,919	0.62	3.3
2014	2	1.51	18.09	15.67	18,802,665	0.31	3.7
2014	3	1.65	12.11	13.51	22,844,866	0.49	2.7
2014	4	1.89	16.68	14	23,782,421	1.99	0.59
2015	1	0.45	16.62	13.85	24,081,863	0.58	3.4
2015	2	0.89	14.33	14	26,238,453	1.07	2.62
2015	3	1.28	17.13	14	27,579,672	0.72	0.29
2015	4	1.74	14.07	13.8	30,245,220	0.76	1.42
2016	1	1.85	14.19	14	31,174,974	0.55	3.66
2016	2	1.59	13.12	16.15	32,556,677	0.89	3.54
2016	3	1.46	11.92	17.12	33,981,417	0.98	3.78
2016	4	1.47	7.59	17.68	35,904,586	1.12	3.2
2017	1	0.00	11.6	15	35,808,762	0.71	3.81
2017	2	0.4	16.89	15.5	33,428,705	0.79	3.67
2017	3	0.00	14.45	16.5	36,727,414	0.45	3.72
2017	4	1.8	9.1	14.85	38,745,978	0.68	3.21
<hr/>							
2013	1	1.86	0.89	80.2	35,990,661	2.54	6.15

2013	2	1.7	0.77	13.31	36,059,890	2.27	6.11
2013	3	1.6	0.86	12.9	36,482,362	3.27	5.94
2013	4	1.62	0.72	12.31	41,802,419	4.27	5.83
2014	1	1.35	0.44	13.71	40,696,711	7.7	5.3
2014	2	1.5	0.41	16.09	38,603,064	6.2	5.5
2014	3	1.75	0.33	15.02	39,195,727	4.4	5.4
2014	4	1.55	0.29	15.05	43,965,392	8.2	4.7
2015	1	1.78	0.25	12.93	44,637,848	6.1	4.8
2015	2	1.58	0.33	13.61	42,422,450	7.8	5.1
2015	3	1.59	0.3	13.31	47,257,502	6.6	5.1
2015	4	1.2	0.29	13.57	47,565,433	3.3	5.3
2016	1	1.35	0.52	13.53	48,316,568	7.2	5
2016	2	1.43	0.4	12.71	46,336,942	4.3	5.7
2016	3	1.81	0.48	13.35	48,305,331	6	5.3
2016	4	1.71	0.74	13.61	52,494,329	6.3	5.3
2017	1	1.78	1.58	15.08	51,762,826	3.9	4.5
2017	2	1.57	1.61	15.66	49,060,944	3.8	5.1
2017	3	1.64	1.37	16.3	51,371,709	3.9	5.2
2017	4	1.78	1.32	17.22	52,794,555	3.9	4.8
<hr/>							
2013	1	0.49	3.8	10.56	44,429,512	3.42	6.8
2013	2	1.44	5.66	10.81	44,880,500	7.17	5.52
2013	3	1.39	5.88	10.86	44,775,739	2.67	5.59
2013	4	1.89	3.75	12.2	48,550,944	5.39	6.85
2014	1	1.66	6.68	11.54	49,015,874	8.63	7.52
2014	2	0.97	9.17	11.94	45,936,685	6.16	4.97
2014	3	1.58	10.47	12.88	46,049,828	6	5.44
2014	4	1.49	5.67	13.41	48,024,827	11.58	5.59
2015	1	1.23	14.81	15.05	47,165,152	6.28	5.86
2015	2	0.94	18.5	14.15	45,091,584	8.17	5.48
2015	3	0.91	20.36	14.72	49,067,609	6.25	4.93
2015	4	1.4	19.52	15.61	48,663,272	1.08	5.74
2016	1	0.64	22.65	15.94	44,396,103	6.63	5.49
2016	2	0.78	21.59	15.93	41,715,718	3.23	5.86
2016	3	1.7	22.12	16	44,930,350	5.1	4.82
2016	4	1.34	18.33	18.33	46,854,025	4.89	4.86
2017	1	0.87	19.48	15.01	46,826,472	3.82	4.91
2017	2	1.28	19.01	15.67	43,134,303	5	5.32
2017	3	1.28	20.79	16.65	46,717,151	2.33	5.38

2017	4	1.38	19.57	18.3	48,675,556	4.29	5.21
2013	1	0.5	14.24	26	6,762,728	5.39	1.82
2013	2	-0.57	14.11	34.97	5,918,146	5.59	2.62
2013	3	-0.49	12.64	30.78	6,139,999	7.74	2.2
2013	4	1.26	13.2	28.92	8,387,435	8.79	3.77
2014	1	-0.72	9.73	27.64	8,298,854	7.75	3.93
2014	2	-1.63	13.1	24.6	7,694,654	6.59	2.9
2014	3	-2.58	14.9	23.27	7,693,292	5.81	2.67
2014	4	-2.36	15.52	24.24	8,159,152	8.65	1.05
2015	1	0.03	13.75	24.42	8,517,735	6.17	0.18
2015	2	-3.26	10.43	19.18	7,760,753	7.39	2.13
2015	3	-4.02	10.77	18.56	7,800,870	5.7	1.38
2015	4	-2.7	9.74	21.25	7,628,047	2.65	4.45
2016	1	-0.31	11.45	19.47	8,044,476	4.42	2.34
2016	2	-2.14	11.35	13.52	10,696,995	1.92	2.46
2016	3	-1.27	11.67	14.27	10,351,126	3.27	1.11
2016	4	-2.4	9.63	12.89	11,345,925	4.04	2.22
2017	1	-1.25	10.13	10.44	11,874,183	5.02	2.82
2017	2	-0.89	5.9	9.55	12,417,508	6.18	2.41
2017	3	0.08	10.22	10.1	13,182,332	5.08	2.85
2017	4	0.38	8.25	11.21	12,749,969	5.37	2.58
2013	1	5.45	4.51	32.68	9,540,797	4.61	7.97
2013	2	0.00	3.44	0	9,854,785	4.36	8.12
2013	3	6.24	3.35	38.46	9,531,804	7.24	8.78
2013	4	5.85	2.93	28.96	11,133,883	6.21	8.58
2014	1	0.00	4.38	0	11,140,075	5.38	8.21
2014	2	6.13	4.8	39.97	11,657,207	5.92	6.23
2014	3	0.00	3.79	0	12,902,388	3.72	8.26
2014	4	0.00	2.11	0	13,534,710	8.61	7.9
2015	1	0.00	4.72	0	13,300,802	7.13	8.01
2015	2	0.00	4.61	0	13,671,807	8.06	7.34
2015	3	5.76	4.23	34.63	14,175,149	8.36	8.23
2015	4	6.65	4.9	34.46	16,928,275	4.48	7.71
2016	1	6.10	6.78	30.42	16,505,055	5.7	5.72
2016	2	5.68	6.8	30.98	17,459,767	4.3	7.96
2016	3	5.48	7.53	40.06	18,147,288	3.07	7.59
2016	4	5.72	5.91	39.04	18,565,645	3.15	7.24
2017	1	5.48	6.29	24.9	17,928,280	3.72	7.43

2017	2	8.28	6.19	826.39	17,684,404	4.49	8.04
2017	3	5.38	5.96	158	17,900,196	4.17	6.82
2017	4	6.21	6.78	65.34	18,765,555	4.77	6.63
<hr/>							
2013	1	4.44	13.35	117.54	323,576,837	8.8	6.1
2013	2	4.47	11.39	110.36	330,066,052	9.38	5.5
2013	3	4.4	4.4	19.27	341,873,664	7.35	4.8
2013	4	4.4	10.23	19.64	362,912,371	8.71	4.78
2014	1	3.51	12.37	20.42	374,844,187	8.43	5.24
2014	2	0.00	9.7	0	375,800,040	6.76	5.34
2014	3	2.74	11.09	16.75	385,987,375	7.75	4.39
2014	4	3.69	11.96	18.39	398,469,508	9.04	4.75
2015	1	3.74	12.46	19.91	406,501,336	6.73	4.1
2015	2	2.98	12.93	16.2	412,939,442	6.9	3.97
2015	3	2.95	14.03	16.54	428,994,343	7.33	3.96
2015	4	3.5	14.05	20.58	448,674,959	3.28	4.28
2016	1	2.63	17.33	20.94	462,140,960	3.77	3.32
2016	2	2.41	18.4	19.1	453,834,421	6.2	3.68
2016	3	2.21	18.86	19.15	476,262,572	3.26	3.83
2016	4	2.1	15	18.92	515,758,941	6.75	4.92
2017	1	2.9	18.84	19.48	540,185,015	5.4	6.4
2017	2	2.29	20.29	17.35	533,993,317	7.11	5.36
2017	3	1.94	19.72	17.68	549,196,842	3.59	7.49
2017	4	1.66	16.48	18.16	561,403,325	4.41	7.16
<hr/>							
2013	1	1.00	2.56	20.58	23,437,365	6.81	5.64
2013	2	2.11	1.85	21.68	27,755,800	5.29	5.41
2013	3	2.35	1.78	12.37	26,649,226	7.68	6.16
2013	4	3.81	1.97	16.4	31,250,447	7.56	6.33
2014	1	0.82	2.13	10.38	35,061,851	6.64	4.91
2014	2	1.36	1.93	16.59	37,109,517	8.16	5.06
2014	3	2.23	1.81	16.08	37,887,895	7.7	5.22
2014	4	1.21	1.69	15.21	41,787,697	4.34	5.33
2015	1	0.88	1.6	14.6	51,360,791	6.55	5.3
2015	2	1.74	2.14	13.75	55,728,060	0.74	5.7
2015	3	2.65	2.47	13.86	59,689,191	0.14	4.88
2015	4	3.96	2.21	16.47	60,739,946	8.06	4.7
2016	1	0.9	2.73	15.8	67,298,872	5.29	5.05
2016	2	1.27	3.6	15.76	66,004,591	3.15	5.21
2016	3	1.64	4.78	16.82	65,140,646	3.2	5.26

2016	4	1.89	4.37	17.78	67,780,074	2.94	5.01
2017	1	0.83	4.17	16.26	68,949,100	3.04	5.13
2017	2	1.58	4.22	15.4	70,203,202	4.91	5.03
2017	3	1.9	4.64	16.55	72,340,856	3.85	5.21
2017	4	2.64	3.39	18.54	73,509,048	3.16	5.03
<hr/>							
2013	1	2.86	5.3	39.14	32,313,260	5.25	5.52
2013	2	2.45	4.6	39.29	28,073,171	4.74	5.59
2013	3	2.46	4.5	39.29	28,073,171	7.09	4.77
2013	4	2.86	5.22	39.14	32,313,260	6.98	5.4
2014	1	2.87	6.34	41.42	33,296,436	4.88	5.5
2014	2	2.64	5.39	42.93	30,732,867	6.83	4.89
2014	3	2.85	5.2	44.52	30,345,736	4.8	4.64
2014	4	0.89	20.2	46.23	30,780,366	7.28	4.03
2015	1	0.38	22.19	45.64	30,564,253	7	3.92
2015	2	0.38	21.3	44.88	31,707,576	6.07	3.18
2015	3	-0.11	20.35	44.43	35,463,225	7.03	3.92
2015	4	1.4	22.39	42.13	36,875,819	5.14	4.14
2016	1	1.64	22.37	45.6	33,683,435	6.04	3.96
2016	2	0.38	30.66	44.88	29,060,788	5.88	3.98
2016	3	-0.23	29.33	41.14	30,752,234	4.74	3.13
2016	4	-0.89	27.9	39.56	34,669,189	3.57	5.28
2017	1	-1.12	32.83	40.26	33,414,622	4.02	5.33
2017	2	0.88	29.23	38.2	30,757,703	4.2	5.15
2017	3	1.46	29.32	39.07	33,352,112	4.1	5.37
2017	4	1.68	29.41	40.32	34,428,339	4.32	4.82
<hr/>							
2013	1	-81.00	29.57	13	8,216,189	6.29	1.1
2013	2	-2.00	32.62	18	8,231,591	7.24	1.12
2013	3	-73.00	38.74	18	8,227,119	7.44	1.77
2013	4	-239.00	41	12	7,988,244	7.81	2.12
2014	1	-3.14	51.83	9	6,586,221	8.45	2.69
2014	2	-10.43	54.53	-0.83	5,393,056	7.47	1.89
2014	3	-8.27	55.61	85.81	7,268,756	4.57	2.76
2014	4	-31.1	0.08	81.24	5,396,271	7.66	3.83
2015	1	-3.59	2.22	63.1	4,783,608	7.08	3.53
2015	2	-6.28	5.21	42	5,048,897	7.55	3.02
2015	3	-9.72	3.65	31.81	5,051,340	7.33	3.5
2015	4	-15.2	3.68	-1.3	3,885,555	5.11	3.02
2016	1	-1.29	3.2	60.95	5,292,157	4.94	2.88

2016	2	-4.42	5.72	52	4,676,179	4.37	3.01
2016	3	-6.98	4.85	42	4,778,081	3.7	3.42
2016	4	-2.45	2.67	34	4,898,271	3.39	3.61
2017	1	-2.13	1.95	22	6,132,092	3.89	3.9
2017	2	-3.97	2.56	14	6,272,249	4.02	3.6
2017	3	-5.41	3.34	9	6,333,524	3.91	3.5
2017	4	-8.49	4.53	-1	6,378,306	3.97	3.42
<hr/>							
2013	1	1.32	4.44	27.96	24,853,722	4.61	7.97
2013	2	1.5	4.34	32.26	20,168,545	4.36	8.12
2013	3	0.75	4.47	26.67	25,653,930	7.24	8.78
2013	4	0.33	5.12	29.55	21,556,344	6.21	8.58
2014	1	0.4	6.91	30.42	26,722,671	5.38	8.21
2014	2	0.59	6.6	26.62	25,619,511	5.92	6.23
2014	3	0.41	6.71	32.51	20,281,911	3.72	8.26
2014	4	0.65	6.94	34.6	20,340,255	8.61	7.9
2015	1	0.78	7.25	33.77	19,766,450	7.13	8.01
2015	2	0.05	4.6	33.12	19,199,359	8.06	7.34
2015	3	0.16	4.53	39.03	15,640,398	8.36	8.23
2015	4	0.00	4.55	48.7	12,037,413	4.48	7.71
2016	1	0.09	5	8.31	15,549,066	5.7	5.72
2016	2	0.18	4.67	11.88	17,588,944	4.3	7.96
2016	3	0.19	7.66	30.41	20,924,657	3.07	7.59
2016	4	0.54	9.48	70.95	14,290,759	3.15	7.24
2017	1	0.64	9.85	87.7	10,602,293	3.72	7.43
2017	2	0.29	9.45	94.95	8,670,568	4.49	8.04
2017	3	0.32	9.24	85.44	9,778,556	4.17	6.82
2017	4	0.36	9.6	75.41	12,357,768	4.77	6.63
<hr/>							
2013	1	15.34	27.97	35.65	1,112,435	-0.29	5.26
2013	2	15.45	28.66	35.57	1,139,378	0.99	8.93
2013	3	15.23	27.33	35.49	1,104,555	0.01	9.38
2013	4	9.13	29.9	43.83	1,146,356	0.59	6.52
2014	1	8.13	36.28	45.49	1,052,560	-0.02	6.93
2014	2	14.81	39.64	35.33	1,131,691	1.19	7
2014	3	7.67	45.82	35.01	1,137,424	0.32	6.26
2014	4	8.81	45.91	34.08	1,099,276	0.98	10.6
2015	1	7.66	55.36	33.71	1,067,098	0.44	5.55
2015	2	8.11	58.25	35.9	1,003,659	0.95	8.58
2015	3	18.36	62.14	53.73	1,024,153	0.22	6.41

2015	4	13.00	63	57.83	965.103	1.7	8.58
2016	1	-1.23	62.24	26.36	924.234	-0.11	7
2016	2	32.09	59.37	-34.44	1,031,378	0.66	4.58
2016	3	29.39	56.45	15.72	982.447	0.71	5.69
2016	4	-47.54	72.86	16.82	1,101,954	2.45	7.61
2017	1	-2.80	71.55	25.81	1,002,821	0.89	7.7
2017	2	3.46	65.88	34.22	1,018,557	0.44	5.3
2017	3	3.84	52.19	56.43	1,101,954	-0.27	7.12
2017	4	-15.19	73.53	80.7	1,119,620	0.26	6.63
<hr/>							
2013	1	2.27	14.88	53	9,230,060	3.39	5.56
2013	2	5.42	15.28	51	9,641,798	5.48	4.02
2013	3	7.2	13.9	28	11,152,220	6.37	5.92
2013	4	8.85	6.31	28	12,265,800	7.02	6.55
2014	1	2.67	8.13	23	13,881,757	7.03	5.85
2014	2	5.47	5.69	39	15,506,316	6.75	2.95
2014	3	6.83	9.36	49	16,991,802	4.91	5.37
2014	4	8.00	10.31	31	18,868,544	7.23	2.93
2015	1	8.00	11.39	27	19,574,913	5.99	16.53
2015	2	4.9	9.37	29	18,248,246	6.03	16.51
2015	3	6.00	14.14	29	19,615,573	5.42	26.12
2015	4	6.8	12.45	33	23,211,394	3.41	21.24
2016	1	1.17	15.7	32	26,665,230	4.33	9.97
2016	2	2.56	13.99	30	23,879,964	4.38	9.92
2016	3	12.77	13.87	28	26,256,311	2.93	3.47
2016	4	5.00	15.47	28	30,676,405	2.58	3.77
2017	1	0.81	16.29	26	33,884,098	3.38	4.18
2017	2	0.68	20.99	22	30,936,787	3.47	1.96
2017	3	2.45	22.7	24	32,246,745	3.04	4.09
2017	4	4.25	16.53	23	36,187,977	3.26	3.91
<hr/>							
2013	1	0.75	7.56	55.31	3,113,769	4	6.02
2013	2	0.87	8.9	56.32	3,169,741	2.9	6.37
2013	3	1.35	9.43	57.79	2,777,152	9.66	5.58
2013	4	0.67	3.97	43.92	4,523,860	9.78	6.5
2014	1	2.79	4.11	42.89	4,889,137	8.8	8.8
2014	2	355.2	3.59	51.48	4,999,036	9.75	9.75
2014	3	3.11	3.47	48.22	6,547,298	5.4	5.4
2014	4	0.17	2.93	42.47	12,454,644	9.43	9.34
2015	1	0.57	6.51	37.84	6,253,079	7.92	5.25

2015	2	0.12	4.21	36.32	7,139,853	8.22	6.54
2015	3	22.8	4.11	49.01	16,873,274	6.6	6.77
2015	4	6.8	4.56	52.34	20,490,798	5.7	6.05
2016	1	11.27	4.4	64.32	25,673,756	4.14	5.09
2016	2	19.7	2.62	48.21	30,604,223	3.87	5.64
2016	3	1.81	5.4	58.02	49,149,829	4.05	5.61
2016	4	48.92	4.61	83.55	27,841,417	1.91	6.54
2017	1	1.12	4.68	47.89	38,428,643	2.41	7.54
2017	2	4.86	4.64	77.61	42,525,127	3.92	6.96
2017	3	2.8	5.77	64.12	45,432,294	1.6	7.78
2017	4	3.42	3.83	53.19	41,493,421	1.3	7.94
<hr/>							
2013	1	0.43	1.51	20.68	57,408,791	3.41	8
2013	2	0.92	2.86	14.05	72,271,073	4.07	5.2
2013	3	1.9	2.86	12.45	79,295,052	7.29	3.48
2013	4	2.25	1.72	13.16	82,728,757	7.5	4.18
2014	1	0.28	3.52	13.92	85,639,875	7.75	5.21
2014	2	0.84	5.23	14.31	86,081,578	6.03	6.33
2014	3	1.32	3.17	14.16	86,321,014	8.24	5.94
2014	4	2.24	1.62	14.67	91,266,658	7.59	7.32
2015	1	0.52	6.18	13.5	95,653,551	5.66	6.83
2015	2	2.47	6.64	13.31	94,586,899	8.21	6.7
2015	3	1.64	7.42	12.8	99,398,140	8.53	5.4
2015	4	2.13	3.19	14.42	101,761,786	9.21	5.2
2016	1	0.52	5.86	14.39	105,727,617	9.37	4.54
2016	2	0.96	6.7	14.39	104,941,245	8.62	5.5
2016	3	1.66	6.21	14.95	107,204,284	8.77	4.64
2016	4	1.54	7.69	14.22	106,134,385	8.13	5.32
2017	1	0.34	9.78	13.4	106,965,347	8.83	2.02
2017	2	0.43	15.7	14.57	110,544,265	8.72	1.04
2017	3	2.12	13.45	15.91	103,688,226	7.93	2.41
2017	4	12.1	7.27	15.16	101,464,235	7.54	2.94
<hr/>							
2013	1	6.32	2.97	83.74	228,279,134	5.82	6.36
2013	2	6.12	2.1	66.46	253,814,639	6.8	6.97
2013	3	6.62	1.74	60.37	290,780,209	6.32	6.5
2013	4	6.82	1.56	61.58	296,344,621	6.2	6.21
2014	1	5.12	4	66.74	305,095,577	6.59	6.4
2014	2	4.59	3.95	56.79	301,762,945	6.66	5.9
2014	3	4.41	2.14	49.97	321,983,260	4.13	5.9

2014	4	4.55	0.9	46.91	136,597,373	7.77	6
2015	1	4.31	3	64.13	128,882,311	6.07	5.2
2015	2	3.98	4.65	55.33	103,310,746	6.78	5.3
2015	3	3.88	9.39	51.12	105,605,213	6.7	5.53
2015	4	11.39	2.1	72.54	423,444,983	3.08	5.94
2016	1	3.74	2.34	51.67	467,425,253	3.71	5.3
2016	2	3.67	2.42	44.16	471,331,848	2.93	5.6
2016	3	3.31	2.1	42.94	510,577,543	2.69	5.61
2016	4	2.00	2.9	40.67	546,661,274	2.74	5.5
2017	1	2.11	2.22	40.43	591,374,665	3.85	5.4
2017	2	2.33	3.46	37.15	618,458,778	3.39	5.1
2017	3	2.45	3.29	42.2	632,742,767	3.88	5.2
2017	4	2.14	2.38	38.87	674,737,108	3.72	5.3

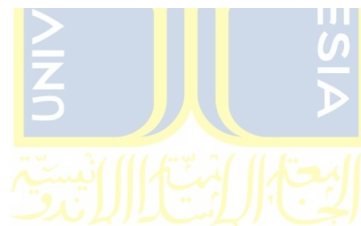


LAMPIRAN II

Hasil Estimasi *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: ROA_Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/06/19 Time: 20:12
Sample: 2013Q1 2017Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 420

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.85551	11.60841	-1.279720	0.2014
NPF_X	-4.30E-06	2.16E-05	-0.198780	0.8425
KPMM_X	0.026354	0.024557	1.073184	0.2838
INF_X	0.126970	0.416420	0.304909	0.7606
PE_X	1.858647	0.499462	3.721301	0.0002
LNSIZE	0.277233	0.642622	0.431409	0.6664
R-squared	0.038021	Mean dependent var		1.549476
Adjusted R-squared	0.026403	S.D. dependent var		22.72775
S.E. of regression	22.42571	Akaike info criterion		9.072476
Sum squared resid	208205.8	Schwarz criterion		9.130194
Log likelihood	-1899.220	Hannan-Quinn criter.		9.095289
F-statistic	3.272539	Durbin-Watson stat		1.872786
Prob(F-statistic)	0.006549			



LAMPIRAN III

Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: ROA_Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/06/19 Time: 20:13
Sample: 2013Q1 2017Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 21
Total panel (balanced) observations: 420

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.87919	29.49676	1.114671	0.2657
NPF_X	-2.06E-06	2.14E-05	-0.096288	0.9233
KPMM_X	0.024944	0.025278	0.986763	0.3244
INF_X	0.249695	0.612289	0.407806	0.6836
PE_X	1.113982	0.630087	1.767981	0.0778
LNSIZE	-2.287793	1.649730	-1.386768	0.1663

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.144140	Mean dependent var	1.549476
Adjusted R-squared	0.089835	S.D. dependent var	22.72775
S.E. of regression	21.68286	Akaike info criterion	9.050827
Sum squared resid	185237.8	Schwarz criterion	9.300938
Log likelihood	-1874.674	Hannan-Quinn criter.	9.149683
F-statistic	2.654237	Durbin-Watson stat	2.101379
Prob(F-statistic)	0.000039		

LAMPIRAN IV

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FE
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.442643	(20,394)	0.0006
Cross-section Chi-square	49.092397	20	0.0003



LAMPIRAN V

Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: ROA_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/06/19 Time: 20:13
 Sample: 2013Q1 2017Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 21
 Total panel (balanced) observations: 420
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.557923	16.39595	-0.217000	0.8283
NPF_X	-2.93E-06	2.12E-05	-0.138241	0.8901
KPMM_X	0.025566	0.024658	1.036855	0.3004
INF_X	0.275731	0.495626	0.556329	0.5783
PE_X	1.478031	0.561473	2.632416	0.0088
LNSIZE	-0.296468	0.910218	-0.325711	0.7448

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		6.441736	0.0811
Idiosyncratic random		21.68286	0.9189

Weighted Statistics			
R-squared	0.021333	Mean dependent var	0.931792
Adjusted R-squared	0.009514	S.D. dependent var	21.76963
S.E. of regression	21.66582	Sum squared resid	194334.9
F-statistic	1.804919	Durbin-Watson stat	2.002472
Prob(F-statistic)	0.110675		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.034866	Mean dependent var	1.549476
Sum squared resid	208888.6	Durbin-Watson stat	1.862956

LAMPIRAN VI

Hasil Uji Hausman

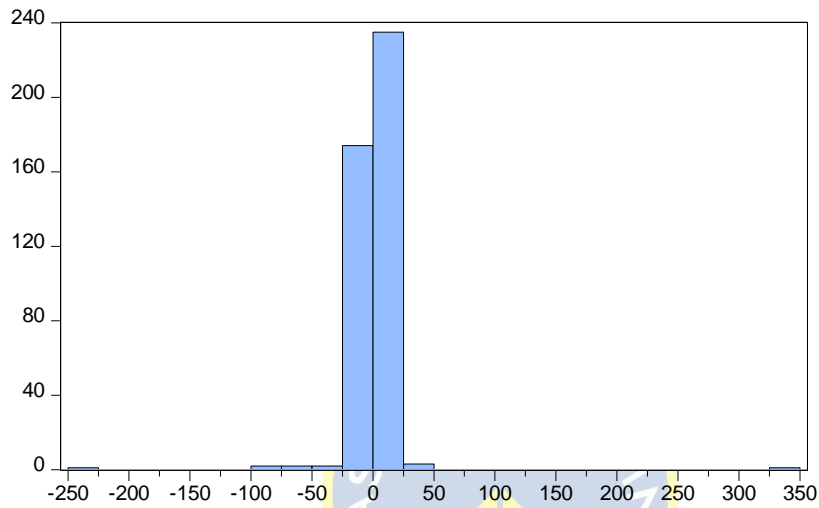
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RE
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.349593	5	0.5003



LAMPIRAN VII

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinieritas

	NPF_X	KPMM_X	INF_X	PE_X	LNSIZE
NPF_X	1.000000	-0.033778	0.054026	0.037409	0.008961
KPMM_X	-0.033778	1.000000	-0.030722	0.133307	-0.086487
INF_X	0.054026	-0.030722	1.000000	-0.021095	0.140377
PE_X	0.037409	0.133307	-0.021095	1.000000	-0.083034
LNSIZE	0.008961	-0.086487	0.140377	-0.083034	1.000000

LAMPIRAN VIII

Hasil Estimasi Variabel Kepemilikan (Pemerintah) *Random Effect Model*

Dependent Variable: ROA_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/05/19 Time: 19:30
 Sample: 2013Q1 2017Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 21
 Total panel (balanced) observations: 420
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.919473	16.37885	0.178247	0.8586
NPF_X	-1.77E-06	2.12E-05	-0.083721	0.9333
KPMM_X	0.023205	0.024633	0.942034	0.3467
INF_X	0.162764	0.491031	0.331473	0.7405
PE_X	1.473852	0.555904	2.651270	0.0083
LNSIZE	-0.743913	0.921524	-0.807264	0.4200
OWN_X	7.763096	4.148554	1.871277	0.0620

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.944035	0.0699
Idiosyncratic random		21.68286	0.9301

Weighted Statistics			
R-squared	0.030471	Mean dependent var	0.979387
Adjusted R-squared	0.016385	S.D. dependent var	21.82767
S.E. of regression	21.64810	Sum squared resid	193548.5
F-statistic	2.163307	Durbin-Watson stat	2.010805
Prob(F-statistic)	0.045620		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.052286	Mean dependent var	1.549476
Sum squared resid	205118.4	Durbin-Watson stat	1.897384

LAMPIRAN IX

Hasil Estimasi Variabel Kepemilikan (Swasta) *Random Effect Model*

Dependent Variable: ROA_Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/05/19 Time: 19:42
 Sample: 2013Q1 2017Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 21
 Total panel (balanced) observations: 420
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.68257	17.87934	0.597481	0.5505
NPF_X	-1.77E-06	2.12E-05	-0.083721	0.9333
KPMM_X	0.023205	0.024633	0.942034	0.3467
INF_X	0.162764	0.491031	0.331473	0.7405
PE_X	1.473852	0.555904	2.651270	0.0083
LNSIZE	-0.743913	0.921524	-0.807264	0.4200
OWN_X	-7.763096	4.148554	-1.871277	0.0620

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.944035	0.0699
Idiosyncratic random		21.68286	0.9301

Weighted Statistics			
R-squared	0.030471	Mean dependent var	0.979387
Adjusted R-squared	0.016385	S.D. dependent var	21.82767
S.E. of regression	21.64810	Sum squared resid	193548.5
F-statistic	2.163307	Durbin-Watson stat	2.010805
Prob(F-statistic)	0.045620		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.052286	Mean dependent var	1.549476
Sum squared resid	205118.4	Durbin-Watson stat	1.897384

LAMPIRAN X

Jumlah BPRS Berdasarkan Provinsi di Indonesia

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Jawa Barat	28	28	28	28	28
Banten	8	8	8	8	8
DKI Jakarta	2	1	1	1	1
D.I. Yogyakarta	11	11	12	12	12
Jawa Tengah	25	26	26	26	26
Jawa Timur	31	29	29	29	29
Bengkulu	2	2	2	3	3
Jambi	-	-	-	-	-
Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10	10
Sumatera Utara	8	8	8	8	8
Sumatera Barat	7	7	7	7	7
Riau	3	3	3	2	2
Sumatera Selatan	1	1	1	1	1
Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
Kepulauan Riau	1	1	1	2	2
Lampung	8	10	11	11	11
Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-

Kalimantan Timur	1	1	1	1	1
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	8	8	8	7	7
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	1	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3
Bali	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-
Papua	1	1	1	1	1
Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-
Maluku Utara	1	1	2	2	3
Total	163	163	166	167	168

Sumber : OJK (2018)